



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



# 2024

---

# LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU  
PENGUNA ANGGARAN ESELON I



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200 3812436 FAKSIMILE 3846402, SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>1</b>
<b>I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>	<b>3</b>
<b>II. NERACA</b>	<b>4</b>
<b>III. LAPORAN OPERASIONAL</b>	<b>5</b>
<b>IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>	<b>6</b>
<b>V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>7</b>
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	63
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	76
F. Pengungkapan Penting Lainnya	80
<b>VI. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-E1</b>	
A. LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan	
B. LRA Belanja dan Pengembalian Belanja	
C. LRA Belanja Dalam Rangka COVID-19	
D. Neraca Percobaan Kas dan Akrual	
E. Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
F. Daftar Saldo Rekening Pemerintah	
G. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	
H. Daftar Satuan Kerja Lingkup DJPb	
I. Telaah Laporan Keuangan	



# **RINGKASAN**

---

# **LAPORAN KEUANGAN**

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED  
UAPPA E-1 DITJEN PERBENDAHARAAN**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan *Audited* Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp30.971.102.363.660,- atau mencapai 103 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp29.925.141.263.00,-

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.705.647.231.950,- atau mencapai 99,3 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp33.934.661.757,-.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp76.836.631.147.998,-; yang terdiri atas: Aset Lancar sebesar Rp43.061.951.784.858,-; Investasi Jangka Panjang (neto) sebesar Rp9.198.083.561.069,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.352.287.078.562,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp4.975.000,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp13.224.303.748.509,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.412.505.805.823.000,- dan Rp46.424.125.342.175,-.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.876.073.219.742,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp41.591.266.795.636,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp10.715.193.575.894,-. Jumlah surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar defisit Rp113.323.930.866,- dan Rp 0,- sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp 10.601.869.645.028,-.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 55.683.836.703.776,- ditambah defisit-LO sebesar Rp10.601.869.645.028-. Kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas defisit Rp21.578.083.988,- ditambah transaksi antar entitas sebesar surplus Rp1.363.711.361.601,- sehingga Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp9.259.711.361.601,- dan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp46.424.125.342.175,-.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



# **LAPORAN**

---

# **REALISASI**

# **ANGGARAN**

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED  
UAPPA E-1 DITJEN PERBENDAHARAAN**

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2024		% thd Angg 2024	31 DESEMBER 2023	Growth % REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	
<b>PENDAPATAN</b>						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	29.925.141.263.000	30.971.102.363.660	103	35.557.630.163.612	-13%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>29.925.141.263.000</b>	<b>30.971.102.363.660</b>	<b>103</b>	<b>35.557.630.163.612</b>	<b>-13%</b>
<b>BELANJA</b>						
<b>Belanja Operasi</b>	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	87.471.915.000	84.954.829.673	97	75.324.206.780	13%
Belanja Barang	B.4	33.269.140.639.000	33.109.966.963.553	100	21.967.174.121.431	51%
Belanja Modal	B.5	578.049.203.000	510.725.438.724	88	437.536.116.413	17%
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>33.934.661.757.000</b>	<b>33.705.647.231.950</b>	<b>99</b>	<b>22.480.034.444.624</b>	<b>50%</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

The cover features a background image of a large, classical-style building with many windows and columns. The image is partially obscured by several overlapping geometric shapes in shades of blue and orange. The word 'NERACA' is prominently displayed in white, bold, uppercase letters, underlined with a white horizontal line.

# **NERACA**

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED  
UAPPA E-1 DITJEN PERBENDAHARAAN**

## II. NERACA

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK/TURUN	% NAIK (TURUN)
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	26.999.593	(26.999.593)	-100,00%
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	2.053.484.598	9.818.134.618	(7.764.650.020)	-79,08%
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	26.288.295.885.004	31.805.963.615.669	(5.517.667.730.665)	-17,35%
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.4	14.213.310.755.807	8.867.103.195.682	5.346.207.560.125	60,29%
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.5	2.106.664.901.835	2.089.282.144.332	17.382.757.503	0,83%
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.6	-	57.197.160	(57.197.160)	-100,00%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	166.786.059.598	587.180.096.355	(420.394.036.757)	-71,60%
Piutang Bukan Pajak	C.8	434.752.276	256.205.006	178.547.270	69,69%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.9	(253.031.675)	(252.138.939)	(892.736)	0,35%
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		181.720.601	4.066.067	177.654.534	4369,20%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.10	12.000.000	12.000.000	-	0,00%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	(60.000)	(60.000)	-	0,00%
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		11.940.000	11.940.000	-	0,00%
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.12	458.136.218.063	6.446.545.338	451.689.672.725	7006,69%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan	C.13	(190.632.471.678)	(32.232.727)	(190.600.238.951)	591325,20%
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)		267.503.746.385	6.414.312.611	261.089.433.774	4070,42%
Persediaan	C.14	17.143.291.030	16.979.669.050	163.621.980	0,96%
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>43.061.951.784.858</b>	<b>43.382.841.371.137</b>	<b>(320.889.586.279)</b>	<b>-0,74%</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
Dana Bergulir	C.16	1.324.501.615.055	1.299.899.736.679	24.601.878.376	1,89%
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	C.17	8.399.546.659.356	8.019.775.521.545	379.771.137.811	4,74%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	C.18	-	1.237.505.000.000	(1.237.505.000.000)	-100,00%
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	C.19	(438.310.115.578)	(261.801.663.542)	(176.508.452.036)	67,42%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	C.20	-	(21.071.190.476)	21.071.190.476	-100,00%
Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	C.21	(87.654.597.764)	(40.372.794.275)	(47.281.803.489)	117,11%
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>9.198.083.561.069</b>	<b>10.233.934.609.931</b>	<b>(1.035.851.048.862)</b>	<b>-10,12%</b>
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	C.22	9.177.179.647.830	9.179.987.122.830	(2.807.475.000)	-0,03%
Peralatan dan Mesin	C.23	1.904.038.313.381	1.868.094.238.213	35.944.075.168	1,92%
Gedung dan Bangunan	C.24	2.308.842.190.683	2.188.851.669.204	119.990.521.479	5,48%
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.25	1.114.536.000	1.114.536.000	-	0,00%
Aset Tetap Lainnya	C.26	13.554.602.492	12.881.015.778	673.586.714	5,23%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.27	97.822.985.061	37.863.584.959	59.959.400.102	158,36%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.28	(2.150.265.196.885)	(2.091.517.794.503)	(58.747.402.382)	2,81%
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>11.352.287.078.562</b>	<b>11.197.274.372.481</b>	<b>155.012.706.081</b>	<b>1,38%</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.30	1.832.811.088	1.862.811.088	(30.000.000)	-1,61%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.31	(1.827.836.088)	(1.828.396.488)	560.400	-0,03%
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>4.975.000</b>	<b>34.414.600</b>	<b>(29.439.600)</b>	<b>-85,54%</b>
<b>ASET LAINNYA</b>					
Aset Tak Berwujud	C.32	941.109.031.886	875.112.569.306	65.996.462.580	7,54%
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.33	3.794.326.637	1.348.604.387	2.445.722.250	181,35%
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.34	50.488.840.795	21.009.926.971	29.478.913.824	140,31%
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.35	12.870.873.477.257	13.112.690.253.718	(241.816.776.461)	-1,84%
Aset Lain-Lain	C.36	68.017.778.101	30.795.913.946	37.221.864.155	120,87%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.37	(709.979.706.167)	(614.689.075.224)	(95.290.630.943)	15,50%
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>13.224.303.748.509</b>	<b>13.426.268.193.104</b>	<b>(201.964.444.595)</b>	<b>-1,50%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>76.836.631.147.998</b>	<b>78.240.352.961.253</b>	<b>(1.403.721.813.255)</b>	<b>-1,79%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.38	7.816.678.114.255	144.007.613.353	7.672.670.500.902	5327,96%
Pendapatan Diterima di Muka	C.40	905.939.300	1.186.095.245	(280.155.945)	-23,62%
Uang Muka dari KPPN	C.41	-	26.999.593	(26.999.593)	-100,00%
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.42	600	1.227.820	(1.227.220)	-99,95%
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>7.817.584.054.155</b>	<b>145.221.936.011</b>	<b>7.672.362.118.144</b>	<b>5283,20%</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang jangka panjang BLU kepada BUN	C.43	22.594.921.751.668	23.648.799.321.466	(1.053.877.569.798)	-4,46%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		22.594.921.751.668	23.648.799.321.466	(1.053.877.569.798)	-4,46%
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>30.412.505.805.823,00</b>	<b>23.794.021.257.477</b>	<b>6.618.484.548.346</b>	<b>27,82%</b>
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas	C.44	46.424.125.342.175	54.446.331.703.776	(8.022.206.361.601)	-14,73%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>46.424.125.342.175</b>	<b>54.446.331.703.776</b>	<b>(8.022.206.361.601)</b>	<b>-14,73%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>76.836.631.147.998</b>	<b>78.240.352.961.253</b>	<b>(1.403.721.813.255)</b>	<b>-1,79%</b>



# LAPORAN --- OPERASIONAL

LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED  
UAPPA E-1 DITJEN PERBENDAHARAAN

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Desember 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.914.446.037	35.590.590.605.767	-35.586.676.159.730	-99,99%
Pendapatan Badan Layanan Umum	D.2	30.872.158.773.705	0	30.872.158.773.705	100,00%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>30.876.073.219.742</b>	<b>35.590.590.605.767</b>	<b>-4.714.517.386.025</b>	<b>-13,25%</b>
<b>BEBAN</b>					
Beban Pegawai	D.3	251.069.390.043	220.973.294.660	30.096.095.383	13,62%
Beban Persediaan	D.4	13.564.000.704	15.571.035.582	-2.007.034.878	-12,89%
Beban Barang dan Jasa	D.5	40.080.337.256.561	20.926.320.742.713	19.154.016.513.848	91,53%
Beban Pemeliharaan	D.6	325.894.723.183	302.501.989.112	23.392.734.071	7,73%
Beban Perjalanan Dinas	D.7	147.398.704.480	150.633.639.040	-3.234.934.560	-2,15%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	347.374.729.201	312.966.366.427	34.408.362.774	10,99%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	425.627.991.464	103.401.534.071	322.226.457.393	311,63%
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>41.591.266.795.636</b>	<b>22.032.368.601.605</b>	<b>19.558.898.194.031</b>	<b>88,77%</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-10.715.193.575.894</b>	<b>13.558.222.004.162</b>	<b>-24.273.415.580.056</b>	<b>-179,03%</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-1.699.085.167	-3.376.888.240	1.677.803.073	-49,68%
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		115.023.016.032	100.244.520.864	14.778.495.168	14,74%
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.10	<b>113.323.930.866</b>	<b>96.867.632.624</b>	<b>16.456.298.242</b>	<b>16,99%</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>-10.601.869.645.028</b>	<b>13.655.089.636.786</b>	<b>-24.256.959.281.814</b>	<b>-177,64%</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
Pendapatan PNB		-	-	-	0,00%
Beban Perjalanan Dinas		-	-	-	0,00%
Beban Persediaan		-	-	-	0,00%
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	D.11	<b>-10.601.869.645.028</b>	<b>13.655.089.636.786</b>	<b>-24.256.959.281.814</b>	<b>-177,64%</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



# **LAPORAN**

---

# **PERUBAHAN**

# **EKUITAS**

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED  
UAPPA E-1 DITJEN PERBENDAHARAAN**

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DES 2024	31 SEP 2023	NAIK/TURUN	%
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	55.683.836.703.776	40.653.782.064.617	15.030.054.639.159	36,97%
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	E.2	(10.601.869.645.028)	13.655.089.636.786	(24.256.959.281.814)	-177,64%
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3				
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	(21.578.083.988)	756.477.974	(22.334.561.962)	-2952,44%
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	(252.230.220)	252.230.220	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		(860.351.667)	(20.035.435)	(840.316.232)	4194,15%
LAIN-LAIN		(20.717.732.321)	1.028.743.629	(21.746.475.950)	-2113,89%
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	1.363.736.367.415	1.374.208.524.399	(10.472.156.984)	-0,76%
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		(9.259.711.361.601)	15.030.054.639.159	(24.289.766.000.760)	-161,61%
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	46.424.125.342.175	55.683.836.703.776	(9.259.711.361.601)	-16,63%

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



# **CATATAN**

---

# **ATAS LAPORAN**

# **KEUANGAN**

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED  
UAPPA E-1 DITJEN PERBENDAHARAAN**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuknya tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan negara di Indonesia, ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

Selaku institusi Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yaitu fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi (*reorganisasi*) dengan "terbentuknya" 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional. Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda, namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama, namun tersebar di berbagai unit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. "*Core function*"nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang milik kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II, yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara, pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara, serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Ditjen dan 7 (tujuh) Direktorat Teknis pada Kantor Pusat serta Kantor Wilayah DJPB dan KPPN pada kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 merupakan titik awal sinergi organisasi baru tersebut.

Landasan Kegiatan Operasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas bidang perbendaharaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen dengan visi **“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia” / “To be a world-class state treasury manager.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan misi sebagai berikut.

- Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien dan optimal;
- Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
- Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, professional dan modern.

Susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;  
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;  
Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.

6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;  
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Selain itu terdapat organisasi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Jumlah entitas akuntansi adalah 216 satuan kerja yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 98 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, 81 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2, dan 3 (tiga) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus. Selain satker vertikal tersebut pada DJPb terdapat juga 4 (empat) satker Kantor Pusat dan 3 (tiga) Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga total satuan kerja DJPb adalah **223** satuan kerja. Tugas unit vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut.

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;  
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 dan A2;  
Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah;  
Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran

anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan;  
Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi;  
Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga terdapat entitas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang koordinasi pelaporan keuangannya dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mempunyai tugas, yaitu:

1. Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);  
Mempunyai tugas menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui integrasi sistem manajemen keuangan negara, penerapan akuntansi akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan kemudahan akses bagi pengguna. SPAN akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Satuan Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);  
Mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
3. Satuan Kerja Komite Investasi Pemerintah (KIP);  
Mempunyai tugas dalam implementasi PP 63/2019 terkait Investasi Pemerintah melalui penetapan Operator Investasi Pemerintah pada BLU Pengelola Dana serta diharapkan dapat menunjukkan pengelolaan dana investasi pemerintah yang optimal dan prudent.
4. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP);  
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH);  
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelauatan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lokasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkedudukan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta Pusat.

Nilai Kinerja  
Organisasi

## A.2 Nilai Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diukur pada Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder (30.00)				116.16
Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan				112.32
1a-CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100.00	110.00	110.00
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100.00	115.61	115.61
1c-CP	Indeks integritas organisasi	100.00	111.34	111.34
Perbendaharaan Negara yang optimal				120.00
2a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3.25	4.00	120.00

2b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP dan BUN	4.00	4.00	120.00
Customer (20.00)				112.07
Belanja negara yang berkualitas				112.07
3a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85.00	103.17	120.00
3b-CP	Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara	100.00	114.37	114.37
3c-CP	Nilai kualitas pelaksanaan anggaran K/L	90.00	93.55	103.94
Internal Process (25.00)				114.92
Pengelolaan kas, pembiayaan, aset dan investasi yang optimal				111.68
4a-CP	Tingkat keberhasilan inklusi sektor keuangan	100.00	100.40	100.40
4b-N	Indeks efektivitas investasi pemerintah pada BA 999.03, BA 999.04, dan BA 999.07	4.00	5.00	120.00
4c-N	Tingkat efektivitas implementasi Kemenkeu Kewilayahan	100.00	118.16	118.16
Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif				120.00
5a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional Economist dan Financial Advisory	80.00	97.03	120.00
5b-N	Tingkat implementasi standardisasi kompetensi Pengelola Perbendaharaan	60.00	120.00	120.00
Pencapaian tugas khusus (Special Mission) yang efektif				113.07
6a-CP	Indeks efektivitas kinerja dan maturitas tata kelola BLU	100.00	116.13	116.13
6b-N	Indeks kemandirian BLU	4.00	4.40	110.00
Learning and Growth (25.00)				118.03
Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif				114.08
7a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100.00	104.48	104.48
7b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96.00	113.04	117.75
7c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100.00	120.00	120.00
Tingkat kualitas pengelolaan SDMPengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel				120.00
8a-CP	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA 015	100.00	120.00	120.00
Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif				120.00
9a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100.00	120.00	120.00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>115.50</b>

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

### A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah 218 entitas.

Basis  
Akuntansi

### A.4 Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

### A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

### **A.6 Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

*Pendapatan-  
LRA*

#### **A.6.1 Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

#### **A.6.2 Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Pengelolaan BMN
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**A.6.3 Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**A.6.4 Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**A.6.5 Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

## A.6.5.1 Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan di neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak 100% tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**A.6.5.2 Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pada tahun 2018 perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap mengalami perubahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Perubahan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) peralatan dan mesin pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - d. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR)

- gedung dan bangunan pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

#### **A.6.5.3 Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **A.6.5.4 Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

#### **A.6.5.5 Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

#### A.6.6 Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Kewajiban pada satuan kerja BPDP Kelapa Sawit diatur kebijakan sebagai berikut:
  - a. Utang atas permintaan kelebihan bayar pungutan oleh eksportir (lebih pungut) diakui apabila telah ada surat ketetapan lebih bayar dari BPDPKS atas permohonan pengembalian kelebihan bayar dari eksportir.
  - b. Utang atas penyaluran biodiesel diakui pada saat Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) menyampaikan tagihan kepada BPDPKS yang nilainya telah diverifikasi oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
  - c. Utang terhadap biaya riset diakui pada saat perjanjian riset ditandatangani oleh BPDPKS dan Lembaga riset sebesar pencairan Tahap I. Pengakuan utang atas biaya riset tahap II dan III diakui sebesar hasil monitoring tahap sebelumnya.
  - d. Utang terhadap biaya surveyor dicatat apabila telah ada tagihan dari surveyor yang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) dan telah diverifikasi oleh PPK.

#### *Ekuitas*

#### **A.6.7 Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **A.6.8 Penggabungan Anggaran Satker di Lingkungan DJPb**

Pada tanggal 13 Oktober 2023 telah ditetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-94/PB/2023 tentang Pilotng Penggabungan Pengelolaan Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dalam Keputusan tersebut, bertujuan untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang agile dan adaptif sehingga perlu dilakukan integrasi dan simplifikasi pengelolaan anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Fungsi dukungan manajemen dan tata usaha di unit layanan

selanjutnya akan dilaksanakan di unit induk. Hal ini dimaksudkan agar unit layanan dapat fokus dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi utamanya, sedangkan pelaksanaan tugas pendukung terkait keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) akan dikelola oleh Satker Unit Induk. Dengan berpedoman pada PMK 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga, pada tahun 2024 dilakukan likuidasi terhadap 5 satuan kerja unit layanan, yaitu KPPN Sidikalang, KPPN Banyuwangi, KPPN Ende, KPPN Kotabaru dan KPPN Tahuna menjadi Satker Inaktif tidak bersaldo. Sisa hak dan kewajiban ditransfer dari satker tersebut ke Satker KPPN Pematang Siantar, KPPN Jember, KPPN Ruteng, KPPN Pelaihari, dan KPPN Bitung sebagai satker induk melalui mekanisme Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TK TM) dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2024, pagu anggaran lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya kenaikan belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Perubahan pagu berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

URAIAN	31 DESEMBER 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan	29.925.141.263.000	
<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 29.925.141.263.000</b>	<b>Rp -</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	Rp 82.345.200.000	Rp 87.471.915.000
Belanja Barang	Rp 862.668.851.000	Rp 830.766.872.000
Belanja Modal	Rp 390.584.091.000	Rp 487.583.389.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 1.335.598.142.000</b>	<b>Rp 1.405.822.176.000</b>
<b>Belanja BLU</b>		
Belanja Barang-BLU	Rp 5.974.803.199.000	Rp 32.438.373.767.000
Belanja Modal-BLU	Rp 5.065.597.000	Rp 90.465.814.000
<b>Jumlah Belanja-BLU</b>	<b>Rp 5.979.868.796.000</b>	<b>Rp 32.528.839.581.000</b>
<b>Total Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 7.315.466.938.000</b>	<b>Rp 33.934.661.757.000</b>

Sedangkan perubahan pagu estimasi pendapatan anggaran per kelompok pendapatan dan pagu anggaran belanja per jenis belanja adalah sebagai berikut:

### a. Pendapatan

URAIAN	31 DESEMBER 2024		Naik/Turun
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
<b>Pendapatan PNPB</b>			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	28.676.662.238.000		
Pendapatan Hibah BLU	345.143.617.000		
Pendapatan BLU Lainnya	896.697.897.000		
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	5.517.511.000		
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan			
Pendapatan Denda	26.000.000		
Pendapatan Lain-Lain	1.094.000.000		
<b>Pendapatan</b>	<b>29.925.141.263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b. Belanja

URAIAN	31 DESEMBER 2024		Naik/Turun
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
<b>Belanja</b>			
<b>Belanja Pegawai</b>			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Uang Makan PNS	57.918.659.000	46.870.259.000	-11.048.400.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		3.536.583.000	3.536.583.000
Belanja Lembur	24.426.541.000	36.252.752.000	11.826.211.000
Belanja Lembur PPK		309.430.000	309.430.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		502.891.000	502.891.000
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>82.345.200.000</b>	<b>87.471.915.000</b>	<b>5.126.715.000</b>
<b>Belanja Barang Non BLU</b>			
Belanja Barang Operasional	183.677.318.000	187.615.544.000	3.938.226.000
Belanja Barang Non Operasional	48.085.927.000	58.744.560.000	10.658.633.000
Belanja Barang Persediaan	15.081.564.000	14.450.823.000	-630.741.000
Belanja Jasa	113.274.934.000	109.141.782.000	-4.133.152.000
Belanja Pemeliharaan	370.436.187.000	325.722.786.000	-44.713.401.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	130.592.452.000	132.817.304.000	2.224.852.000
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.520.469.000	2.274.073.000	753.604.000
<b>Jumlah Belanja Barang Non BLU</b>	<b>862.668.851.000</b>	<b>830.766.872.000</b>	<b>-31.901.979.000</b>
<b>Belanja Modal Non BLU</b>			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.160.232.000	232.396.833.000	98.236.601.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.929.859.000	191.446.436.000	6.516.577.000
Belanja Modal Lainnya	71.494.000.000	63.740.120.000	-7.753.880.000
<b>Jumlah Belanja Modal Non BLU</b>	<b>390.584.091.000</b>	<b>487.583.389.000</b>	<b>96.999.298.000</b>
<b>Jumlah Belanja Non BLU</b>	<b>1.335.598.142.000</b>	<b>1.405.822.176.000</b>	<b>70.224.034.000</b>
<b>Belanja BLU</b>			
Belanja Barang-BLU	5.974.803.199.000	32.438.373.767.000	26.463.570.568.000
Belanja Modal-BLU	5.065.597.000	90.465.814.000	85.400.217.000
<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>5.979.868.796.000</b>	<b>32.528.839.581.000</b>	<b>26.548.970.785.000</b>
<b>Total Jumlah Belanja</b>	<b>7.315.466.938.000</b>	<b>33.934.661.757.000</b>	<b>26.619.194.819.000</b>

Sedangkan apabila dilihat dari **Kegiatan** Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KO DE	KEGIATAN	31 Desember 2024	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
<b>CD</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko</b>		
4802	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	891.780.000	811.306.000
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	6.680.662.000	7.059.018.000
4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	4.406.059.000	3.276.354.000
4805	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	33.984.000	32.541.000
4806	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	172.775.000	591.095.000
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	37.566.065.000	35.973.462.000
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	15.498.509.000	15.857.452.000
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1.750.417.000	1.768.984.000
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3.510.063.000	3.545.795.000
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	9.024.039.000	8.926.181.000
	<b>Jumlah Belanja Program CD</b>	<b>79.534.353.000</b>	<b>77.842.188.000</b>

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2024	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
4711	Legislasi dan Litigasi	193.400.000	285.656.000
4715	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	628.697.231.000	728.884.042.000
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	7.503.200.000	11.366.343.000
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	144.542.921.000	164.283.696.000
4722	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.274.699.000	1.399.932.000
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	464.874.212.000	406.494.356.000
6990	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	8.978.126.000	13.494.228.000
	<b>Jumlah Belanja Program WA</b>	<b>1.256.063.789.000</b>	<b>1.326.208.253.000</b>
	<b>Jumlah Rupiah Murni</b>	<b>1.335.598.142.000</b>	<b>1.404.050.441.000</b>
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	5.733.450.257.000	31.476.838.588.000
4836	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	25.118.306.000	106.232.671.000
4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM	74.554.227.000	77.175.298.000
4838	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1.718.180.000	2.731.900.000
4839	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	2.609.287.000	5.144.431.000
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	23.292.042.000	23.292.042.000
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	22.951.513.000	678.223.703.000
4716	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	7.477.861.000	14.605.805.000
4717	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	9.824.949.000	25.329.177.000
4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM	41.206.921.000	50.316.411.000
4721	Pengelolaan Organisasi dan SDM	33.394.068.000	61.991.298.000
4723	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	438.476.000	438.476.000
4724	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	760.005.000	760.005.000
4726	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	400.000.000	400.000.000
4727	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	157.300.000	2.641.737.000
6886	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	2.515.404.000	2.718.039.000
	<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>5.979.868.796.000</b>	<b>32.528.839.581.000</b>
<b>CD</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>		
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-	1.499.865.000
WA	Program Dukungan Manajemen		
<b>4719</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM</b>	<b>-</b>	<b>271.870.000</b>
	<b>Jumlah Belanja Hibah Luar Negeri</b>	<b>-</b>	<b>1.771.735.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>7.315.466.938.000</b>	<b>33.934.661.757.000</b>

## B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan  
Rp30.971.102.363.660

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp30.971.102.363.660,-** atau mencapai **103,5 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp29.925.141.263.000,-**. Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa,

Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut.

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	31 Desember 2024		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	76.500.000	138.659.080	50,5%
Pendapatan dari Penjualan Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	70.352.900	0,0%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.758.000.000	1.885.034.251	107,2%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.055.000.000	846.639.703	80,3%
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	2.628.011.000	1.139.272.250	43,4%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	107.760.000	0,0%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	26.000.000	2.361.363.145	9082,2%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	51.000.000	312.529.050	612,8%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	70.000.000	1.805.456.661	2579,2%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	973.000.000	148.461.310	15,3%
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	4.000.000	0,0%
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	57.197.160	0,0%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	2.784	0,0%
<b>Jumlah PNBP Lainnya</b>	<b>6.637.511.000</b>	<b>8.876.728.294</b>	<b>132,2%</b>
Pendapatan Investasi	273.508.270.000	312.082.653.573	114,1%
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	27.850.194.000.000	25.755.025.778.000	92,5%
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	552.959.968.000	601.611.650.529	108,8%
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	345.143.617.000	691.646.713.137	200,4%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	896.551.810.000	3.470.940.756.224	387,1%
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	146.087.000	124.985.493.778	85555,5%
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	243.979.720	
Pendapatan Lain-lain BLU	-	5.688.610.405	
<b>Jumlah PNBP BLU</b>	<b>29.918.503.752.000</b>	<b>30.962.225.635.366</b>	<b>103,5%</b>
<b>Jumlah Netto</b>	<b>29.925.141.263.000</b>	<b>30.971.102.363.660</b>	<b>103,5%</b>

Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami

penurunan sebesar **12,90 persen** dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan pada Pendapatan Jasa Layanan BLU.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)%
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	4.079.958.184	3.882.481.594	5,09%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	107.760.000	30.000.000	259,20%
Pendapatan Denda	2.361.363.145	309.217.868	663,66%
Pendapatan Lain-Lain	2.327.646.965	1.812.570.684	28,42%
<b>Jumlah PNBP Lainnya</b>	<b>8.876.728.294</b>	<b>6.034.270.146</b>	<b>47,11%</b>
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU	26.668.720.082.102	32.861.265.475.521	-18,84%
Pendapatan Hibah BLU	691.646.713.137	224.703.422.899	207,80%
Pendapatan BLU Lainnya	3.601.877.122.799	2.471.086.012.765	45,76%
<b>Jumlah PNBP BLU</b>	<b>30.962.243.918.038</b>	<b>35.557.054.911.185</b>	<b>-12,92%</b>
Pengembalian Pendapatan	18.282.672	5.459.017.719	-99,67%
<b>Jumlah Netto</b>	<b>30.971.102.363.660</b>	<b>35.557.630.163.612</b>	<b>-12,90%</b>

Pada TA 2024 realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengalami penurunan 20,49 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 ditetapkan tarif terendah USD 0 s.d. 55 untuk pengenaan harga Crude Palm Oil (CPO) di bawah atau sama dengan USD 680/ton dan tarif tertinggi sebesar USD 240 untuk pengenaan harga CPO di atas USD 1430/ton. Kemudian pada tanggal 19 September 2024 diundangkan PMK 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan BLU BPD PKS pada Kementerian Keuangan dimana pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya menjadi tarif komposit terhadap Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan dengan pembagian kelompok berdasarkan PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Selain itu, terdapat perubahan kebijakan dasar penetapan Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2022 dimana sebelumnya menggunakan dua harga CPO tertinggi namun sekarang menggunakan harga CPO median dan harga CPO yang paling mendekati median (Harga CPO CIF Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia).

Selain perubahan tarif dan kebijakan penetapan harga referensi CPO, penurunan

volume ekspor juga berkontribusi pada penurunan realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Realisasi volume ekspor sawit tahun 2024 sebesar 34.979.349 MT, mengalami penurunan 7,70 persen dibandingkan realisasi volume ekspor sawit tahun 2023 sebesar 37.898.712 MT. Hal ini dikarenakan penurunan permintaan dari negara importir utama. Kenaikan harga minyak nabati dunia yang disebabkan konflik Rusia dan Ukraina, kenaikan harga Crude Oil yang disebabkan Badai Francine yang mengganggu produksi minyak di Amerika Serikat, penurunan produksi CPO yang disebabkan kekurangan tenaga kerja yang melanda industri sawit Malaysia, serta cuaca buruk yang melanda beberapa daerah penghasil sawit di Indonesia juga berdampak pada penurunan volume ekspor, sehingga menyebabkan realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengalami penurunan.

Realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (424138) tahun 2024 secara bruto adalah sebesar Rp25.771.315.153.000,-. Atas kelebihan bayar pungutan ekspor, para eksportir dapat menyampaikan permohonan pengembalian dana (restitusi) kepada BPDPKS. Nilai pengembalian dana tahun 2024 sebesar (Rp16.289.375.000,-) sehingga Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (424138) netto sebesar Rp25.755.025.778.000,- atau 92,48 persen dari estimasi pendapatannya. Realisasi terbesar dalam Pendapatan PNBP Lainnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersumber dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Berikut merupakan rincian pendapatan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

*Realisasi Pendapatan Per Akun per 31 Desember 2024*

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN)	Perubahan
424136	Pendapatan Investasi	312.082.653.573	263.379.033.609	18,49%	48.703.619.964
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	25.755.025.778.000	32.393.330.489.134	-20,49%	-6.638.304.711.134
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	601.611.650.529	204.555.952.778	194,11%	397.055.697.751
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Lain	691.646.713.137	224.703.422.899	207,80%	466.943.290.238
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.470.940.756.224	2.364.187.053.394	46,81%	1.106.753.702.830
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	124.985.493.778	100.083.008.053	24,88%	24.902.485.725
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	243.979.720	0	100,00%	243.979.720
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	5.688.610.405	1.356.933.599	319,23%	4.331.676.806
	<b>Total PNBP BLU</b>	<b>30.962.225.635.366</b>	<b>35.551.595.893.466</b>	<b>-12,91%</b>	<b>-4.589.370.258.100</b>

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN)	Perubahan
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	138.659.080	213.849.380	-35,16%	- 75.190.300
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	70.352.900	245.770.774	-71,37%	- 175.417.874
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.885.034.251	1.660.203.565	13,54%	224.830.686
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	846.639.703	469.441.673	80,35%	377.198.030
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.139.272.250	1.293.216.202	-11,90%	- 153.943.952
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	107.760.000	30.000.000	259,20%	77.760.000
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.361.363.145	309.217.868	663,66%	2.052.145.277
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	312.529.050	255.931.900	22,11%	56.597.150
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.805.456.661	391.803.969	360,81%	1.413.652.692
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	148.461.310	168.910.766	-12,11%	- 20.449.456
425931	Penerimaan Setoran dan Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	4.000.000	7.625.560	-47,54%	- 3.625.560
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	57.197.160	686.568.012	-91,67%	- 629.370.852
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.784	301.730.477	0,00%	- 301.727.693
<b>Total PNPB Lainnya</b>		<b>8.876.728.294</b>	<b>6.034.270.146</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.842.458.148</b>
<b>Total Pendapatan</b>		<b>30.971.102.363.660</b>	<b>35.557.630.163.612</b>	<b>-12,90%</b>	<b>-4.586.527.799.952</b>

## B.2. REALISASI BELANJA

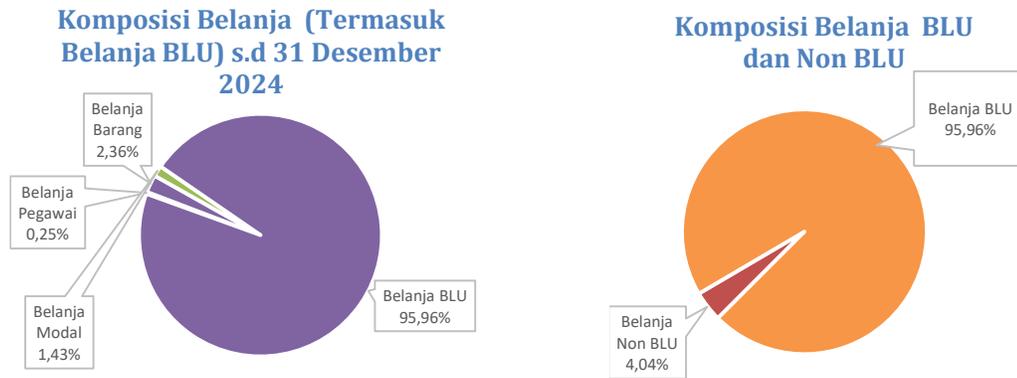
Realisasi Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp33.705.647.231.950,-** atau **99,33 persen** (termasuk realisasi belanja satker BLU) dari anggaran belanja sebesar **Rp33.934.661.757.000,-** Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah pengembalian belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar **Rp369.590.696,-**. Rincian anggaran dan realisasi belanja per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

### Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	87.471.915.000	84.959.854.493	97,13
Belanja Barang	830.766.872.000	795.073.592.876	95,70
Belanja Modal	487.583.389.000	482.897.569.371	99,04
<b>Jumlah</b>	<b>1.405.822.176.000</b>	<b>1.362.931.016.740</b>	<b>96,95</b>
Belanja Barang-BLU	32.438.373.767.000	32.315.226.321.273	99,62
Belanja Modal-BLU	90.465.814.000	27.859.484.633	30,80
<b>Jumlah BLU</b>	<b>32.528.839.581.000</b>	<b>32.343.085.805.906</b>	<b>99,43</b>
Pengembalian Belanja	-	369.590.696	100,00
<b>Total Belanja</b>	<b>33.934.661.757.000</b>	<b>33.705.647.231.950</b>	<b>99,33%</b>



Komposisi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut.



Belanja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut program terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko serta Program Dukungan Manajemen. Adapun rincian dari Belanja Menurut Program dan Kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

*Realisasi Belanja Per Program dan Kegiatan Dana Rupiah Murni per 31 Desember 2024*

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2024	
		Anggaran	Realisasi
<b>CD</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko</b>		
4802	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	811.306.000	760.254.097
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	7.059.018.000	6.265.317.097
4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	3.276.354.000	3.070.840.659
4805	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	32.541.000	32.194.000
4806	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	591.095.000	584.074.000
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	35.973.462.000	33.443.679.734
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	15.857.452.000	14.319.393.429
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1.768.984.000	1.544.913.868
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3.545.795.000	3.178.258.335
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	8.926.181.000	8.332.171.119
	<b>Jumlah Belanja Program CD</b>	<b>77.842.188.000</b>	<b>71.531.096.338</b>

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2024	
		Anggaran	Realisasi
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
4711	Legislasi dan Litigasi	285.656.000	243.382.805
4715	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	728.884.042.000	711.902.105.720
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	11.366.343.000	9.986.238.400
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	164.283.696.000	154.313.831.247
4722	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.399.932.000	1.238.186.746
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	406.494.356.000	402.851.109.128
6990	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	13.494.228.000	9.145.634.356
	<b>Jumlah Belanja Program WA</b>	<b>1.326.208.253.000</b>	<b>1.289.680.488.402</b>
	<b>Jumlah Rupiah Murni</b>	<b>1.404.050.441.000</b>	<b>1.361.211.584.740</b>

*Realisasi Belanja Per Program dan Kegiatan Dana Non Rupiah Murni per 31 Desember 2024*

KODE	KEGIATAN	31 Desember 2024	
		Anggaran	Realisasi
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	31.476.838.588.000	31.385.004.781.568
4836	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	106.232.671.000	36.449.526.107
4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM	77.175.298.000	69.348.159.904
4838	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	2.731.900.000	2.090.511.841
4839	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	5.144.431.000	5.142.102.113
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	23.292.042.000	23.182.653.603
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	678.223.703.000	668.376.623.016
4716	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	14.605.805.000	14.414.968.272
4717	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	25.329.177.000	22.956.925.967
4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM	50.316.411.000	50.052.879.420
4721	Pengelolaan Organisasi dan SDM	61.991.298.000	59.990.752.710
4723	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	438.476.000	436.381.142
4724	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	760.005.000	271.894.721
4726	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	400.000.000	287.505.100
4727	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	2.641.737.000	2.588.887.085
6886	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	2.718.039.000	2.491.253.337
	<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>32.528.839.581.000</b>	<b>32.343.085.805.906</b>
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	1.499.865.000	1.488.368.000
WA	Program Dukungan Manajemen		
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	271.870.000	231.064.000
	<b>Jumlah Belanja Hibah Luar Negeri</b>	<b>1.771.735.000</b>	<b>1.719.432.000</b>
	<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>369.590.696</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>33.934.661.757.000</b>	<b>33.705.647.231.950</b>

Belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut Fungsi terdiri dari 2 (dua) Fungsi, yaitu Pelayanan Umum dan Ekonomi. Adapun rincian dari Belanja Menurut Fungsi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Realisasi Belanja Per Fungsi per 31 Desember 2024

Fungsi	Pagu	Realisasi
Pelayanan Umum	33.073.945.064.000	32.860.596.507.577
Ekonomi	860.716.693.000	845.050.724.373
Pengembalian Belanja	0	369.590.696
<b>Jumlah</b>	<b>33.934.661.757.000</b>	<b>33.705.647.231.950</b>

Realisasi belanja neto sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 49,9 persen dari realisasi belanja neto sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Realisasi Belanja mengalami peningkatan yang signifikan pada belanja pegawai dan belanja barang BLU.

Perbandingan realisasi belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan 2023 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	84.959.854.493	75.365.708.480	12,79%
Belanja Barang	795.073.592.876	769.068.056.939	3,38%
Belanja Modal	482.897.569.371	380.763.521.587	12,6%
<b>Jumlah</b>	<b>1.362.931.016.740</b>	<b>1.225.197.287.006</b>	<b>11%</b>
Belanja Barang BLU	33.705.647.231.950	21.198.730.813.911	59,0%
Belanja Modal BLU	27.859.484.633	57.480.360.598	-51,5%
<b>Jumlah BLU</b>	<b>32.343.085.805.906</b>	<b>21.256.211.174.509</b>	<b>52%</b>
Pengembalian Belanja	369.590.696	1.374.016.894	-73%
<b>Jumlah Netto</b>	<b>33.705.647.231.950</b>	<b>22.480.034.444.621</b>	<b>49,9%</b>

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 84.954.829.673,-** dan **Rp75.324.206.780,-**. Realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,79 persen dari realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan 44 pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Belanja Pegawai  
Rp 84.954.829.673

**Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 2.396.292.800		
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 36.321		
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	Rp 89.380.440		
Belanja Tunjangan Anak PPPK	Rp 16.082.072		
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 403.920.000		
Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 92.552.760		
Belanja Uang Makan PPPK	Rp 373.885.000		
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	Rp 6.375.000		
Belanja Uang Makan PNS	Rp 45.370.221.850	Rp 49.569.790.430	-8,47%
Belanja Uang Lembur PPPK	Rp 225.612.000		
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	Rp 488.348.000		
Belanja Uang Lembur	Rp 35.497.148.250	Rp 25.795.918.050	37,61%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 84.959.854.493</b>	<b>Rp 75.365.708.480</b>	<b>12,73%</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp 5.024.820	Rp 41.501.700	-87,89%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 84.954.829.673</b>	<b>Rp 75.324.206.780</b>	<b>12,79%</b>

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp488.348.000,- merupakan Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat Bagi Badan Pengarah Papua.

**B.4 Belanja Barang**

Belanja Barang

Rp33.109.966.963.553

Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp33.109.966.963.553,-** dan **Rp21.967.174.121.431,-**.

**Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	Rp 183.230.255.333	Rp 177.857.258.393	3,02%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 53.633.076.162	Rp 52.054.257.899	3,03%
Belanja Persediaan	Rp 14.112.737.796	Rp 15.686.598.322	-10,03%
Belanja Jasa	Rp 104.722.234.589	Rp 105.957.924.700	-1,17%
Belanja Pemeliharaan	Rp 323.328.061.997	Rp 300.299.224.948	7,67%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 114.364.977.399	Rp 115.062.305.281	-0,61%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 1.682.249.600	Rp 2.150.487.399	-21,77%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 795.073.592.876</b>	<b>Rp 769.068.056.942</b>	<b>3,38%</b>
Belanja Barang BLU	Rp <b>32.315.226.321.273</b>	Rp 21.198.730.813.911	52,44%
<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>Rp 32.315.226.321.273</b>	<b>Rp 21.198.730.813.911</b>	<b>52,44%</b>
Pengembalian Belanja	Rp 332.950.596	Rp 624.749.422	-46,71%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 33.109.966.963.553</b>	<b>Rp 21.967.174.121.431</b>	<b>50,72%</b>

Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **50,72 persen** dibandingkan realisasi belanja barang sampai

dengan tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut didominasi pada Belanja Barang BLU yang meningkat hingga 52,44 persen.

#### B.4.1 Belanja Barang BLU

Belanja Barang BLU  
Rp32.315.226.321.273

Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp32.315.226.321.273** dan **Rp 21.198.724.724.579,-**. Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar **52,44 persen** dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan penyaluran dana untuk kegiatan peremajaan sawit rakyat (PSR), peningkatan penyaluran dana untuk kegiatan riset, promosi dan kemitraan, pengembangan SDM dan sarana prasarana sawit serta peningkatan penyaluran dana program promosi dan kemitraan di BLU.

#### Perbandingan Belanja Barang BLU 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 166.135.774.270	Rp 145.698.009.680	14,03%
Belanja Barang	Rp 13.298.571.765	Rp 11.301.528.454	17,67%
Belanja Jasa	Rp 57.783.318.825	Rp 46.948.434.957	23,08%
Belanja Pemeliharaan	Rp 1.945.454.637	Rp 1.510.255.263	28,82%
Belanja Perjalanan	Rp 31.483.610.445	Rp 36.060.685.265	-12,69%
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 31.385.004.781.568	Rp 20.748.770.766.043	51,26%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	Rp 486.266.692	Rp 566.216.415	-14,12%
Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	Rp 659.088.543.071	Rp 207.406.480.901	217,78%
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-		Rp 12.347.601	-100,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp32.315.226.321.273</b>	<b>Rp 21.198.274.724.579</b>	<b>52,44%</b>

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp510.725.438.724,-** dan **Rp437.536.116.413,-**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal  
Rp510.725.438.724

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah		Rp 199.773.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 230.963.514.698	Rp 195.294.503.102	18,26%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19		Rp -	-
Belanja Pemasangan Nilai Peralatan dan Mesin			
Belanja Perjalanan Nilai Peralatan dan Mesin			
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 4.600.000	Rp 182.867.283	-97,48%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 53.795.983.266	Rp 54.844.936.119	-1,91%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 134.615.014.861	Rp 74.664.460.233	80,29%
Belanja Modal Lainnya	Rp 61.876.527.600	Rp 54.639.603.954	13,24%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp 1.641.928.946	Rp 937.377.896	75,16%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 482.897.569.371</b>	<b>Rp 380.763.521.587</b>	<b>26,82%</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 13.407.822.426	Rp 17.240.566.051	-22,23%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	Rp 7.580.158.577	Rp 37.364.274.160	-79,71%
Belanja Modal Lainnya BLU	Rp 6.871.503.630	Rp 2.875.520.387	138,97%
<b>Jumlah Belanja BLU</b>	<b>Rp 27.859.484.633</b>	<b>Rp 57.480.360.598</b>	<b>-51,53%</b>
Pengembalian Belanja	Rp 31.615.280	Rp 707.765.772	-95,53%
<b>Jumlah Belanja Total</b>	<b>Rp 510.725.438.724</b>	<b>Rp 437.536.116.413</b>	<b>16,73%</b>

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar **16,73 persen** dibandingkan realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan realisasi belanja modal secara umum disebabkan karena kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

### B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Rp230.957.663.348

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin (sekaligus penambahan Nilai peralatan dan Mesin) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp230.953.663.348,-** dan **Rp195.477.370.385,-**.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 230.963.514.698	Rp 195.294.503.102	18,26%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp -	-
Belanja Pemasangan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	-
Belanja Perjalanan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 4.600.000	Rp 182.867.283	-97,48%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 230.968.114.698</b>	<b>Rp 195.477.370.385</b>	<b>18,16%</b>
Pengembalian Belanja	Rp 10.451.350	Rp -	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 230.957.663.348</b>	<b>Rp 195.477.370.385</b>	<b>18,15%</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan karena pembelian Kendaraan Dinas untuk Pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Pengadaan Peremajaan Server dan Pengadaan *Expansion System Backup* DJPb Tahun 2024.

### B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Rp 188.389.834.197

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp188.389.834.197,-** dan **Rp128.801.630.580,-**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **46,26 persen** dibandingkan realisasi per tanggal 31 Desember 2023.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 188.389.834.197	Rp 128.801.630.580	46,26%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 188.389.834.197</b>	<b>Rp 128.801.630.580</b>	<b>46,26%</b>

### B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya  
Rp 63.518.456.546

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp63.518.456.546,-** dan **Rp55.576.981.850,-**. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31

Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **14,29 persen** dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	Rp 61.876.527.600	Rp 54.639.603.954	100,00%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp 1.641.928.946	Rp 937.377.896	75,16%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 63.518.456.546</b>	<b>Rp 55.576.981.850</b>	<b>14,29%</b>
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 63.518.456.546</b>	<b>Rp 55.576.981.850</b>	<b>14,29%</b>

Kenaikan realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2024 disebabkan karena pembelian lisensi, *Clearpass Access Point* Pendukung Implementasi SAKTI TA 2024, Pengadaan Perangkat Lunak Replikasi Database SAKTI Tahun 2024 dan Pengadaan Pengembangan Aplikasi SAKTI Berbasis Microservices TA 2024.

**B.5.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp13.407.822.426,-** dan **Rp17.240.566.051,-**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar **22,23 persen** dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 13.407.822.426	Rp 17.240.566.051	-22,23%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 13.407.822.426</b>	<b>Rp 17.240.566.051</b>	<b>-22%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 13.407.822.426</b>	<b>Rp 17.240.566.051</b>	<b>-22,23%</b>

Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin-  
BLU  
Rp13.407.822.426

Belanja Modal Gedung  
dan Bangunan-BLU  
Rp7.580.158.577

### B.5.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp7.580.158.577,-** dan **Rp37.364.274.160,-**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar **79,71 persen** dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	Rp 7.580.158.577	Rp 37.364.274.160	-79,71%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 7.580.158.577</b>	<b>Rp 37.364.274.160</b>	<b>-79,71%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 7.580.158.577</b>	<b>Rp 37.364.274.160</b>	<b>-79,71%</b>

Belanja Modal Lainnya-  
BLU Rp6.871.503.630

### B.5.7 Belanja Modal Lainnya BLU

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp6.871.503.630,-** dan **Rp2.875.520.397,-**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar **138,97 persen** dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 6.871.503.630	Rp 2.875.520.397	138,97%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 6.871.503.630</b>	<b>Rp 2.875.520.397</b>	<b>139%</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 6.871.503.630</b>	<b>Rp 2.875.520.397</b>	<b>138,97%</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp26.999.593,-**. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan keuangan.

*Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	Rp -	Rp 26.999.593
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 26.999.593</b>

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp2.053.484.598,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp2.053.484.598,-** dan **Rp9.818.134.618,-**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas, yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berasal dari pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor dan GUP-Kartu Kredit Pemerintah yang belum dibayarkan ke Bank Penerbit KKP.

*Rekapitulasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 28.703.248	Rp 56.293.769
Kas lainnya di BLU	Rp 2.024.781.350	Rp 9.761.840.849
<b>Total</b>	<b>Rp 2.053.484.598</b>	<b>Rp 9.818.134.618</b>

*Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini.*

### C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada BLU  
Rp26.288.295.885.004,  
-

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp26.288.295.885.004,-** dan **Rp31.805.963.615.669,-**. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas tunai (yang sudah disahkan BUN maupun yang belum disahkan) dan kas pada rekening Bank yang berada pada Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit, Pusat Investasi Pemerintah dan BPD Lingkungan Hidup.

#### Rincian Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
BPDP Kelapa Sawit	23.943.119.153.956	29.919.863.002.696
Pusat Investasi Pemerintah	48.959.976.559	430.861.569.746
BPDLH	2.296.216.754.489	1.455.239.043.227
<b>Jumlah</b>	<b>26.288.295.885.004</b>	<b>31.805.963.615.669</b>

#### Rincian Kas setiap Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2024
<b>Kas dan Bank - BLU</b>	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 1.273.119.153.956
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp 109.616.754.489
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp 48.959.976.559
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.431.695.885.004</b>
<b>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</b>	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp -
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp -
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>
<b>Setara kas Lainnya - BLU</b>	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 22.670.000.000.000
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP	Rp 2.186.600.000.000
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24.856.600.000.000</b>
<b>Total</b>	<b>Rp 26.288.295.885.004</b>

### C.4 Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Investasi Jangka  
Pendek-BLU  
Rp14.213.310.755.807,  
-

Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp14.213.310.755.807,-** dan **Rp8.867.103.195.682,-**. Investasi Jangka Pendek-BLU merupakan pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan

operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil dan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Investasi dapat dicairkan/dikonversi dalam bentuk uang dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 bulan;
- b. Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan
- c. Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum terdiri dari:

- a. Saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum BPDPKS mencakup seluruh Kas dan Bank BLU (yang sudah disahkan BUN) berupa deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan s.d. 6 (enam) bulan dan Surat Berharga Negara (SBN) kategori *Available for Sale (AFS)*.

Saldo deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan s.d. 6 bulan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6.685.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: BTN sebesar Rp960.000.000.000,-, BJB sebesar Rp4.100.000.000.000,-, dan Bank DKI sebesar Rp1.625.000.000.000,-.

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-469/MK.05/2017 tanggal 5 Juni 2017 hal Persetujuan bagi BLU BPDPKS untuk Melakukan Pengelolaan Dana Dalam Bentuk Investasi Jangka Panjang, BPDPKS melakukan pembelian SBN mulai tahun 2019. Selanjutnya, dengan ditetapkannya BPDPKS menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP) dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166/KMK.05/2022 tanggal 18 Mei 2022, dimana Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP) untuk BPDPKS selaku OIP dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2022 tanggal 18 Mei 2022, penempatan dana pada SBN terus mengalami peningkatan.

Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri ditunjuk sebagai bank kustodian. Saldo SBN pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.499.810.755.807,-. Rincian pembelian dan penjualan SUN adalah sebagai berikut: Pada bulan Desember 2019, BPDPKS melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) tradeable seri FR0063 dan FR0065 dengan nilai penempatan Rp190.700.000.000,-. Kemudian pada awal tahun 2020 melakukan pembelian SBN tradeable seri FR0064, FR0065, FR0076, FR0080, FR0082, dan FR0083 dengan nilai

penempatan Rp1.003.206.376.776,- serta penjualan SUN AFS seri FR0064, FR0065, FR0076, FR0080, FR0082, dan FR0083 dengan nilai sebesar Rp685.499.600.000,-. Tahun 2022 melakukan pembelian SUN AFS seri FR0091 dan FR0093 dengan nilai penempatan Rp285.348.300.000,-. Tahun 2023 melakukan pembelian SBN AFS seri FR0056, FR0082, FR00084, FR0095, FR0096 dan FR0098 dengan nilai penempatan Rp1.532.155.918.906,- serta penjualan SBN AFS seri FR0076 dan FR0083 dengan nilai Rp249.407.800.000,-. Tahun 2024 melakukan pembelian SBN AFS seri FR0076 dan FR0083 dengan nilai penempatan Rp249.407.800.000,-. Tahun 2024 melakukan pembelian SUN AFS seri FR0097 dengan nilai penempatan Rp3.766.219.860.120,- serta penjualan SUN AFS seri FR0091, FR0093 dan FR0098 dengan nilai Rp342.912.300.000,-. Per 31 Desember 2024, nilai SUN seri FR0056, FR0080, FR0082, FR0084, FR0095, FR0096, dan FR0097 mengalami penurunan dari harga perolehannya. Secara keseluruhan, Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum BPD PKS berupa pembelian SUN mengalami kerugian sebesar 0,77 persen dengan nominal sebesar Rp42.291.791.594,-.

- b. Nilai Investasi Jangka Pendek-BLU PIP per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.028.500.000.000,- berbentuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan.

*Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
BPDP Kelapa Sawit	12.184.810.755.807	7.667.103.195.682
Pusat Investasi Pemerintah	2.028.500.000.000	1.200.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>14.213.310.755.807</b>	<b>8.867.103.195.682</b>

### C.5 Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp2.106.664.901.835,-** dan **Rp2.089.282.144.332,-**. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Rekapitulasi Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) adalah sebagai berikut.

*Belanja Dibayar  
Dimuka  
Rp2.106.664.901.835,-*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	Rp 2.106.664.901.835	Rp 2.089.282.144.332
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.106.664.901.835</b>	<b>Rp 2.089.282.144.332</b>

### C.6 Uang Muka Belanja (*prepayment*)

Uang Muka Belanja  
(*prepayment*) Rp0,-

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp57.197.160,-**. Uang Muka Belanja merupakan pembayaran dimuka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Transaksi uang muka belanja pada Ditjen Perbendaharaan merupakan transaksi persekot gaji hasil reklasifikasi akun Belanja Pegawai dibayar dimuka (*prepaid*). Pengertian dari Persekot Gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai yang dipindahkan/ dimutasi untuk kepentingan dinas. Pedoman pembayaran persekot gaji sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor SE-125/A/621/1095 tanggal 3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji bagi Pegawai Negeri. Sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan PER-41/PB/2016 tanggal 19 Oktober 2016, maka transaksi Uang Muka Belanja (*prepayment*) hanya pada satker Kantor Pusat DJPb.

*Rincian Uang Muka Belanja (prepayment)  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kantor Pusat DJPb	-	57.197.160
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>57.197.160</b>

### C.7 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang  
masih harus diterima  
Rp166.786.059.598,-

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp166.786.059.598,-** dan **Rp587.180.096.355,-**. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Rekapitulasi Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
BPD Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 119.130.079.200	Rp 151.821.150.415
Pusat Investasi Pemerintah	Rp 26.153.553.275	Rp 22.669.258.455
BPD Lingkungan Hidup	Rp 21.496.321.123	Rp 412.678.574.318
Kanwil DJPb Jawa Tengah	Rp 3.106.000	Rp 5.219.000
KPPN Purworejo	Rp -	Rp 139.500
Kanwil DJPb Kalimantan Timur	Rp -	Rp 5.754.667
Kanwil DJPb Sumatera Barat	Rp -	Rp -
Kanwil DJPb Jambi	Rp 3.000.000	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 166.786.059.598</b>	<b>Rp 587.180.096.355</b>

Piutang Bukan Pajak  
Rp434.752.276,-

### C.8 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp434.752.276,-** dan **Rp256.205.006,-**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari Piutang PNBP sebesar **Rp252.118.506,-** dan Piutang Lainnya sebesar **Rp182.633.770,-**.

#### Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	Rp 117.540.595	Rp 121.627.095
KPPN Tangerang	Rp 134.577.911	Rp 134.577.911
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 252.118.506</b>	<b>Rp 256.205.006</b>

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KPPN Tobelo	Rp 7.940.070	Rp -
Kantor Pusat DJPb	Rp 97.466.800	Rp -
KPPN Cirebon	Rp 37.000	Rp -
Kanwil DJPb Jawa Tengah	Rp 185.000	Rp -
KPPN Bondowoso	Rp 630.300	Rp -
KPPN Jember	Rp 37.000	Rp -
Kanwil DJPb Sumatera Utara	Rp 146.000	Rp -
KPPN Rantau Prapat	Rp 192.000	Rp -
KPPN Jambi	Rp 109.000	Rp -
KPPN Manado	Rp 70.000	Rp -
KPPN Palu	Rp 61.185.000	Rp -
Kanwil DJPb Kalimantan Timur	Rp 37.000	Rp -
Kanwil DJPb Sulawesi Tengah	Rp 13.950.000	Rp -
Kanwil DJPb Bangka Belitung	Rp 226.000	Rp -
Kanwil DJPb D.I Yogyakarta	Rp 37.000	Rp -
KPPN Kolaka	Rp 385.600	Rp -
Kanwil DJPb Kalimantan Utara	Rp -	Rp 4.086.500
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 182.633.770</b>	<b>Rp -</b>

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih –Piutang  
Bukan Pajak defisit  
Rp253.031.675,-

### C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp253.031.675,-** dan **Rp252.138.939,-**. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. adalah sebagai berikut.

#### Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	Rp -	0,5%	Rp -
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 253.031.675	100%	Rp 253.031.675
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>Rp 253.031.675</b>		<b>Rp 253.031.675</b>

### C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR  
Rp12.000.000,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp12.000.000,-** dan **Rp12.000.000,-**. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

#### Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KPPN Cirebon	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.000.000</b>	<b>Rp 12.000.000</b>

### C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Bagian  
Lancar TP/TGR defisit  
Rp60.000,-

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp60.000,-** dan **Rp60.000,-**. Penyisihan piutang tak tertagih–Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	Rp 60.000	Rp 60.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 60.000</b>	<b>Rp 60.000</b>

### C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan operasional badan layanan umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp458.136.218.063,-** dan **Rp6.446.545.338,-**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Rekapitulasi Saldo Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 30 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

*Piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum Rp458.136.218.063,-*

Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	Rp443.626.692.738	Rp6.434.473.609
Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	Rp14.509.525.325	Rp12.071.729
<b>Jumlah Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum</b>	<b>Rp 458.136.218.063</b>	<b>Rp 6.446.545.338</b>

### C.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp190.632.471.678,-** dan **Rp32.232.727,-**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp190.632.471.678,-*

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Pi	Rp 190.513.422.726	Rp 32.172.368
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Pi	Rp 119.048.952	Rp 60.359
	Rp -	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 190.632.471.678</b>	<b>Rp 32.232.727</b>

### C.14 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp17.143.291.030,-** dan **Rp16.979.669.050,-**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

#### Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Persediaan  
Rp17.143.291.030,-

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	Rp 16.644.062.846	Rp 16.618.765.911
Barang untuk Pemeliharaan	Rp 499.228.184	Rp 360.903.139
Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 17.143.291.030</b>	<b>Rp 16.979.669.050</b>

### C.16 Dana Bergulir

Dana Bergulir  
Rp1.324.501.615.055,-

Saldo Dana Bergulir Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.324.501.615.055,-** dan **Rp1.299.899.736.679,-**. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Saldo Dana Bergulir ini merupakan milik satuan kerja BLU BPD Lingkungan Hidup.

#### Rincian Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Satker	31-Dec-24	31-Dec-23
1	Dana Bergulir	Rp 1.324.501.615.055	Rp 1.299.899.736.679
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.324.501.615.055</b>	<b>Rp 1.299.899.736.679</b>

### C.17 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum

Investasi Non  
Permanen BLU  
Rp8.399.546.659.356,-

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp8.399.546.659.356,-** dan **Rp8.019.775.521.545,-**. Investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Saldo Investasi Jangka Panjang ini merupakan milik satuan kerja Pusat Investasi Pemerintah yang berupa penyaluran dana bergulir kepada

Lembaga Penyalur/*Linkage* untuk pembiayaan ultra mikro yang dijamin dengan piutang secara fidusia. Terdapat selisih Rp39,- karena pembulatan yang tidak bisa masuk dalam aplikasi SAKTI.

*Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada Satker Pusat Investasi Pemerintah  
Per 31 Desember 2024*

No	LKBB/ <i>Linkage</i>	31 Desember 2024
1	PT. PNM	7.399.999.999.976
2	Koperasi Syariah Annisa	400.000.000
3	KSP Karya Baitul Mandiri	39.227.666.669
4	PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia	6.752.138.848
5	LKMA Mojo Agung	545.000.004
6	LKMA Tani Makmur	1.025.000.000
7	PT LKMS Mahirah Muamalah	2.384.666.659
8	KSPPS BMT Al Amanah Sinjai	163.333.341
9	Kopdit Pelangi Kasih	3.073.599.404
10	Koperasi Al Manar	2.709.999.996
11	KSPPS Raya Banda Madani	19.289.417.992
12	KSPPS Artha Bahana Syariah	10.013.793.108
13	KSP Jujur Utama Mandiri	2.571.428.569
14	KSP Sila Mukti	2.005.194.808
15	KSP Sari Sedana Bali	1.942.857.138
16	KSP KUD Mintorogo	5.994.996.444
17	KSPPS Abdi Kerta Raharja	5.899.487.178
18	KSP Guna Prima Dana	1.866.666.662
19	PT LKM Gentha Persada	673.777.780
20	KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	5.677.374.349
21	KSU Gapoktan Al Basiko II	760.000.000
22	KSPPS BMT Jati	270.833.337
23	PT LKM Batang	6.974.358.974
24	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	100.689.655.169
25	KSPPS Mitra Dhuafa Syariah	28.622.222.221
26	Koperasi Jasa Karya Abadi	7.000.000.000
27	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	14.219.999.997
28	KSP Permata Siaga	733.333.336
29	KSPPS BMT Al Ishlah	220.000.000
30	KSPPS BMT Ibaadurrahman	3.334.222.219
31	Koperasi Konsumen Central Hutama Mandiri	733.333.336
32	KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri	1.303.333.331
33	KSPPS BMT Ayyasi	728.333.331
34	BMT Niaga Utama	2.300.000.000
35	BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera	1.150.000.000
36	KSP Karya Mandiri	2.000.000.002
37	KSP Permata Utama	2.500.000.000
38	KSU Krama Bali	1.000.000.000
39	KSPPS BMT El Itqan	791.666.665
40	KSPPS Muhammadiyah Surya Mandiri	4.600.000.001
41	KSPPS BMT Al Fataya	1.799.999.999
42	KSPPS Nusa Ummat Sejahtera	144.999.999.999
43	KSP Mitra Dhuafa	281.931.034.483
44	Koperasi Dana Raharja	2.320.000.000
45	KSPPS BMT Ampek Jurai	760.000.000
46	KSP Citra Mandiri	1.000.000.000
47	LKM Sedasa	500.000.000
48	Koperasi BTM Sumbar	2.000.000.000
49	KSPPS BMT Harapan Bersama Kalingga	4.000.000.000
50	KSPPS BMT Huwaiza	500.000.000
51	KSPPS BMT Alhikmah Semesta	30.000.000.000
52	PT LKM BKD Pekalongan	2.000.000.000
53	PT Bahana Artha Ventura - langsung	15.000.000.000
54	Pembiayaan Direct Lending	4.000.000
55	PT BAV	220.583.934.070
<b>Jumlah</b>		<b>8.399.546.659.395</b>

Dana Bergulir  
Diragukan Tertagih  
defisit  
Rp438.310.115.578,-

### C.19 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp438.310.115.578,-** dan **Rp261.801.663.542,-**. Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih ini merupakan milik satuan kerja BLU BPD Lingkungan Hidup.

#### Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Outstanding setelah Dikurangi Nilai Jaminan (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	520.563.243.714	0,5%	2.602.816.219
Kurang Lancar	42.393.818.366	10%	4.239.381.837
Diragukan	14.394.395.251	50%	7.197.197.626
Macet	431.198.630.513	100%	431.198.630.513
Lunas Pokok	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>1.042.588.721.717</b>		<b>445.238.026.194</b>

Dana DNS senilai Rp16.085.306.116,- dalam keadaan macet sebagai penambah akumulasi penyisihan piutang tak tertagih dan pengurang ekuitas (tidak menambah Beban Penyisihan) yang dicatat sesuai dengan Nota Dinas Direktur APK nomor ND-1102/PB.6/2022 tanggal 9 November 2022.

No	Rincian	Nilai
1	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Kementerian Negara/Lembaga	(429.152.720.078)
2	Penyesuaian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Akibat Crash Program Berupa Keringanan Yang Diterima Debitur	6.024.437.703
3	Penyesuaian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Akibat penghapusan secara bersyarat terhadap piutang (PSBDT)	903.472.913
4	Dana Bergulir Diragukan tertagih lainnya- DNS	(16.085.306.116)
	<b>Total</b>	<b>(438.310.115.578)</b>

### C.20 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Rp0,-

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp21.071.190.476,-**. Saldo Investasi Jangka Panjang ini merupakan milik satuan kerja BPDPKS yang berupa Investasi pada Surat Utang Negara.

### C.21 Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih defisit Rp87.654.597.764,-

Saldo Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar defisit **Rp87.654.597.764,-** dan **Rp40.372.794.275,-**. Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum diragukan tertagih merupakan estimasi penyisihan tidak tertagih atas penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada penyalur maupun *linkage*. Saldo ini merupakan milik satuan kerja BLU PIP dengan rincian penyisihan dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 sebagai berikut.

*Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih PIP per 31 Desember 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Investasi	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	Rp 8.351.516.162.166	0,5%	Rp 41.757.580.811
Kurang Lancar	Rp 1.823.908.044	10%	Rp 182.390.804
Diragukan	Rp 983.926.072	50%	Rp 491.963.036
Macet	Rp 45.222.663.113	100%	Rp 45.222.663.113
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>Rp 8.399.546.659.395</b>		<b>Rp 87.654.597.764</b>

Perhitungan Investasi Non-permanen Badan Layanan Umum diragukan tertagih pada per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 117,11 persen dibandingkan dengan pada akhir Tahun 2023 sebesar Rp40.372.794.275,-.

### C.22 Tanah

Tanah Rp9.177.179.122.830,-

Saldo aset tetap tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp9.177.179.647.830,-** dengan kuantitas **1.723.793 m<sup>2</sup>** dan **Rp9.179.987.122.830,-** dengan kuantitas **1.723.614 m<sup>2</sup>**. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut.

## Rincian Tanah per 31 Desember 2024

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>9.179.987.122.830</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	86.228.966.994
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	92.228.000
Perolehan Lainnya	1.818.815.000
Hibah Masuk	1.265.324.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	(92.212.808.994)
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>9.177.179.647.830</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2024</b>	<b>9.177.179.647.830</b>

Adapun penjelasan atas status kepemilikan Tanah tersebut terdapat 7 bidang Tanah di Direktorat Jenderal Perbendaharaan masih dalam status sengketa sampai ranah pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	UE I	Tanah	
		Jumlah NUP	Luas Sengketa
1	DJPB	7	17.599

Adapun rincian status penyelesaian atas Aset Tanah Masih dalam Status Sengketa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Status Sengketa	Total
Dalam upaya melakukan proses perlawanan hukum	1
Dalam proses pengajuan eksekusi	2
Masih dilakukan upaya hukum lain	2
Menunggu realisasi putusan banding	1
Pengajuan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)	1
<b>Total</b>	<b>7</b>

Selain 7 bidang tanah sengketa pengadilan, terdapat pula 6 bidang tanah yang dikuasai pihak lain tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut diantaranya menyebabkan proses sertifikasi tanah menjadi terhambat.

No.	Unit Eselon I	Jumlah NUP	Luas Tanah (m2)
1	DJPB	6	32.424

Terkait aset yang sedang dalam sengketa non-litigasi, saat ini Kementerian Keuangan tengah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah

Daerah, Kantor Pertanahan setempat, serta menempuh upaya mediasi dan pendekatan persuasif terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

### C.23 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin  
Rp1.904.038.313.381,-

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.904.038.313.381,-** dan **Rp1.868.094.238.213,-**. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut.

#### Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>1.868.094.238.213</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	6.100.600
Hibah Masuk	18.334.000
Perolehan Lainnya	20.300.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	41.802.100
Penyelesaian Pembangunan Langsung	49.209.573
Internal Transfer Masuk	72.378.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	252.038.200
Saldo Awal	287.063.949
Pembatalan Penghapusan	652.810.815
Batal Transfer Keluar	1.116.848.758
Pengembangan Melalui KDP	2.696.358.944
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	4.457.939.008
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	8.355.957.845
Reklasifikasi Masuk	16.033.747.847
Transfer Masuk	79.695.946.774
Pembelian	233.187.082.862
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-170.260.657.456
Transfer Keluar	-121.556.842.067
Reklasifikasi Keluar	-16.033.747.847
Hibah Keluar	-1.997.702.018
Koreksi Pencatatan	-875.032.320
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-199.984.399
Internal Transfer Keluar	-72.378.000
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>1.904.038.313.381</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024</b>	<b>1.446.505.553.441</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2024</b>	<b>457.532.759.940</b>

Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak sesuai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan telah direklasifikasi ke kode barang yang sesuai. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

### C.24 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan  
Rp2.308.842.190.683,-

Saldo Aset Tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp2.308.842.190.683,-** dan **Rp2.188.851.669.204,-**. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut:

#### Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>2.188.851.669.204</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pengembangan Melalui KDP	83.280.739.071
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	40.927.947.264
Transfer Masuk	32.301.170.232
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	5.622.114.595
Saldo Awal	5.355.647.980
Koreksi Susulan	3.699.949.384
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.784.637.000
Reklasifikasi Masuk	1.544.158.193
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.544.149.431
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	997.215.197
Pembelian	940.255.500
Hibah Masuk	540.172.500
Penyelesaian Pembangunan Langsung	50.000.000
Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	16.000.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Manual	(409.253.283)
Reklasifikasi Keluar	(1.544.158.193)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(3.487.322.999)
Koreksi Pencatatan	(5.095.187.594)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(15.772.346.067)
Transfer Keluar	(32.305.366.732)
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>2.308.842.190.683</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024</b>	<b>702.805.096.229</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2024</b>	<b>1.563.341.097.062</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp1.114.536.000,-

### C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.114.536.000,-** dan **Rp1.114.536.000,-**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>1.114.536.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
-	0
<b>Mutasi Kurang:</b>	
-	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>1.114.536.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024</b>	669.712.110
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2024</b>	<b>444.823.890</b>

Rincian **Asset** tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Aset Tetap Lainnya  
Rp13.554.602.492,-

### C.26 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp13.554.602.492,-** dan **Rp12.881.015.778,-**. Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rp12.067.858.598,- dan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp1.486.743.794,-. Aset Tetap Renovasi adalah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik satuan kerja.

#### Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>12.881.015.778</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Saldo Awal	125.975.351
Pembelian	648.001.600
Penyelesaian Dengan KDP Aset Tetap Renovasi	1.194.266.946
Penyelesaian Langsung Aset Tetap Renovasi	49.950.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	704.119.700
Penyelesaian Pembangunan Langsung	50.200.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-35.091.950
Transfer Keluar	-2.063.834.933
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>13.554.602.492</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024</b>	284.835.105
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2024</b>	<b>13.269.767.387</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

### C.27 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 97.822.985.061,-

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp97.822.985.061,-** dan **Rp37.863.584.959,-**. Saldo konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

#### Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>37.863.584.959</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Perolehan/Penambahan KDP	35.530.343.747
Pengembangan KDP	164.018.811.887
Koreksi Nilai KDP Bertambah	7.549.562.503
Perolehan Lainnya KDP	1.524.293.338
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	(1.085.005.585)
Reklasifikasi Keluar KDP	(14.951.173.142)
Reklasifikasi Masuk KDP	14.951.173.142
Koreksi Pencatatan KDP	(5.558.595.845)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(4.854.519.573)
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>97.822.985.061</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2024</b>	<b>97.822.985.061</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap defisit Rp2.150.265.196.885,-

### C.28 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing defisit **Rp2.150.265.196.885,-** dan **Rp2.091.517.794.503,-**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	Rp 1.952.456.830.182	Rp 1.446.505.553.441	Rp 505.951.276.741,00
Gedung dan Bangunan	Rp 2.193.393.587.642	Rp 702.805.096.229	Rp 1.490.588.491.413,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 1.114.536.000	Rp 669.712.110	Rp 444.823.890,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 12.314.407.145	Rp 284.835.105	Rp 12.029.572.040,00
<b>umulasi Penyusutan</b>	<b>Rp 4.159.279.360.969</b>	<b>Rp 2.150.265.196.885</b>	<b>Rp 2.009.014.164.084,00</b>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Piutang Tagihan  
TP/TGR  
Rp1.832.811.088,-

### C.30 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp1.832.811.088,-** dan **Rp1.862.811.088,-**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Rekapitulasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut.

*Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Satker BLU	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kantor Pusat DJPb	Rp 1.827.811.088	Rp 1.845.811.088
KPPN Cirebon	Rp 5.000.000	Rp 17.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.832.811.088</b>	<b>Rp 1.862.811.088</b>

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – TP/TGR  
defisit  
Rp1.827.836.088,-

### C.31 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp1.827.836.088,-** dan **Rp1.828.396.488,-**. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Tagihan Penjualan Angsuran yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	Rp 5.000.000	0,5%	Rp 25.000
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 1.827.811.088	100%	Rp 1.827.811.088
<b>Total</b>	<b>Rp 1.832.811.088</b>		<b>Rp 1.827.836.088</b>

### C.32 Aset Tak Berwujud

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp941.109.031.886,-** dan **Rp875.112.569.306,-**.

Aset Tak Berwujud  
Rp941.109.031.886,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Penyusutan Aset Tak Berwujud berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 berlaku mulai TA 2016. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

#### Rincian Saldo Aset Berwujud Per 31 Desember 2024

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	875.112.569.306
<b>Mutasi tambah:</b>	
Saldo Awal	15.200.000
Koreksi Susulan	8.020.194.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	9.975.973.600
Pembelian	56.025.845.780
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Pencatatan	-8.020.194.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	- 20.556.800
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>941.109.031.886</b>
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	649.057.050.324
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2024</b>	<b>292.051.981.562</b>

#### Uraian Jenis Aset Berwujud Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai
1	Software	Rp 367.950.359.160
2	Lisensi	Rp 573.080.483.726
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 78.189.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 941.109.031.886</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara.

### C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp3.794.326.637,-** dan **Rp1.348.604.387,-**.

Aset Tak Berwujud  
Dalam Pengerjaan  
Rp3.794.326.637,-

Dana Yang Dibatasi  
Penggunaannya  
Rp50.488.840.795,-

### C.34 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp50.488.840.795,-** dan **Rp21.009.926.971,-**.

Dana Kelolaan Badan  
Layanan Umum  
Rp12.870.873.477.257,-

### C.35 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp12.870.873.477.257,-** dan **Rp13.112.690.253.718,-**. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2024 berasal dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, yaitu dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU.

#### Rekapitulasi Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2024
1	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	Rp 11.885.315.686.439
2	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	Rp 985.557.790.818
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 12.870.873.477.257</b>

Aset Lain-Lain  
Rp68.017.778.101,-

### C.36 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp68.017.778.101,-** dan **Rp30.795.913.946,-**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dalam proses penghapusan dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap. Mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

#### Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	30.795.913.946
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset	11.764.400
Transfer Masuk (Henti Guna)	203.560.892
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	2.886.726.294
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	186.076.887.873
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-144.593.498.540
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-6.334.804.008
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	-825.211.864

Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	-203.560.892
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>68.017.778.101</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024</b>	31.861.566.131
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2024</b>	<b>36.156.211.970</b>

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara.

### C.37 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya defisit Rp709.979.706.167,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp709.979.706.167,-** dan **Rp614.689.075.224,-**. Rekapitulasi akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024*

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Software	Rp 349.569.740.580	Rp 361.971.083.885	Rp (12.401.343.305)
Lisensi	Rp 525.497.939.726	Rp 287.085.966.439	Rp 238.411.973.287
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 875.067.680.306</b>	<b>Rp 649.057.050.324</b>	<b>Rp 226.010.629.982</b>
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp -	Rp 60.912.377.443	Rp (60.912.377.443)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 44.889.000	Rp 10.278.400	Rp 34.610.600
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 44.889.000</b>	<b>Rp 60.922.655.843</b>	<b>Rp (60.877.766.843)</b>
<b>Total</b>	<b>Rp 875.112.569.306</b>	<b>Rp 709.979.706.167</b>	<b>Rp 165.132.863.139</b>

### C.38 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp7.816.678.114.255,-*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp7.816.678.114.255,-** dan **Rp144.007.613.353,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Rekapitulasi Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

## Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp 335.518.000	Rp 257.173.200
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 7.772.654.534.250	Rp 119.661.380.738
3	Belanja Modal yang masih harus dibayar	Rp -	Rp -
4	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 40.320.895.696	Rp -
6	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	Rp 1.342.384.959	Rp 14.327.218.566
7	Dana Pihak Ketiga	Rp 2.024.781.350	Rp -
8	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	Rp -	Rp 9.761.840.849
<b>Total</b>		<b>Rp 7.816.678.114.255</b>	<b>Rp 144.007.613.353</b>

## C.39 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp905.939.300,-

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp905.939.300,-** dan **Rp1.186.095.245,-**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan diterima dimuka pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

## C.40 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp26.999.593,-**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

## C.41 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp600,-

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp600,-** dan **Rp1.227.820,-**. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pajak tersebut yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Utang Jangka Panjang  
BLU kepada BUN  
Rp22.594.921.751.668,  
-

### C.42 Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN

Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp22.594.921.751.668,-** dan **Rp22.411.294.321.466,-**.

Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan kewajiban atas penerimaan Dana Kelolaan dari BA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Rincian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

#### Rincian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Satker BLU	31 Desember 2024	31 Desember 2023
BPD Lingkungan Hidup	Rp (12.594.921.751.668)	Rp (12.411.294.321.466)
Pusat Investasi Pemerintah	Rp (10.000.000.000.000)	Rp (10.000.000.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp (22.594.921.751.668)</b>	<b>Rp (22.411.294.321.466)</b>

### C.43 Ekuitas

Ekuitas  
Rp46.424.125.342.175,  
-

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp46.424.125.342.175,-** dan **Rp55.683.836.703.776,-**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Saldo PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp30.876.073.219.742,-** dan **Rp35.590.590.605.767,-**. Pos pendapatan penerimaan badan layanan umum pada tahun 2023 termasuk dalam pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya, namun pada tahun 2024 didetailkan menjadi 2 (dua) pos pendapatan, yaitu PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

Pendapatan PNBP  
Lainnya  
Rp3.914.446.037,-

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp3.914.446.037,-** dan **Rp2.445.072.122,-**. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (PNBP) merupakan penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari layanan yang dikendalikan oleh pemerintah, dan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. PNBP pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	138.659.080	213.849.380	-35,16%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.414.421.028	1.620.274.397	-12,70%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.361.363.145	309.217.868	663,66%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.784	301.730.477	-100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>3.914.446.037</b>	<b>2.445.072.122</b>	<b>60,10%</b>

Realisasi Pendapatan PNBP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar **60,10 persen** dibandingkan realisasi pendapatan per tanggal 31 Desember 2023.

Pada PNBP Lainnya, Terdapat perbedaan nilai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan di LRA dengan beban Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan di LO sebesar -Rp275,148,778, utamanya disebabkan karena adanya pengakuan pendapatan yang masih harus diterima pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Pendapatan Badan  
Layanan Umum  
Rp30.872.158.773.705,  
-

### D.2 Pendapatan Badan Layanan Umum

Saldo Pendapatan Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp30.872.158.773.705,-** dan **Rp35.588.145.533.645,-**. Pendapatan Badan

Layanan Umum (BLU) merupakan penerimaan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU sesuai dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Sumber pendapatan BLU terdiri dari penerimaan atas layanan utama, hasil kerja sama, hibah, dan pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan BLU pada periode ini terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Pendapatan Investasi	374.300.591.757	348.480.003.336	7,41%
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	25.763.100.829.716	32.399.764.962.743	-20,48%
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	596.836.856.353	212.684.886.916	180,62%
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha -	691.646.713.137	224.703.422.899	207,80%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.441.524.004.702	2.401.961.676.116	43,28%
Pendapatan Lain-lain BLU	4.749.778.040	550.581.635	762,68%
<b>Jumlah</b>	<b>30.872.158.773.705</b>	<b>35.588.145.533.645</b>	<b>-13,25%</b>

Realisasi Pendapatan BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 13,25 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 20,48 persen. Sementara itu, beberapa komponen mengalami kenaikan signifikan, di antaranya Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya yang meningkat sebesar 180,62 persen, Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri yang naik sebesar 207,80 persen, serta Pendapatan Lain-lain BLU yang melonjak sebesar 762,68 persen.

Di sisi lain, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU mengalami kenaikan sebesar 43,28 persen, sedangkan Pendapatan Investasi mengalami pertumbuhan sebesar 10,02 persen. Selain itu, adanya Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu yang mencapai Rp124.985.493.778,- berkontribusi terhadap total pendapatan BLU pada tahun 2024.

Pada pendapatan badan layanan umum terdapat perbedaan nilai antara LRA dan LO dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Pendapatan Investasi**

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Pendapatan Investasi sebesar Rp(62.217.938.184,-). Perbedaan ini terjadi karena adanya pengakuan piutang atas pendapatan investasi yang masih harus diterima pada tahun 2023 dan 2024. Dalam pencatatan akrual, pendapatan investasi diakui ketika hak atas pendapatan tersebut telah diperoleh, meskipun kasnya belum diterima. Namun, dalam pencatatan berbasis kas, pendapatan baru dicatat saat pembayaran benar-benar diterima, sehingga terjadi selisih antara kedua metode pencatatan ini.

### **2. Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit**

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp(8.075.051.716,-). Perbedaan ini disebabkan oleh pengakuan piutang yang masih harus diterima terkait pendapatan dari dana perkebunan kelapa sawit. Dalam metode akrual, pendapatan sudah dicatat karena dana tersebut telah menjadi hak pemerintah, meskipun realisasi penerimaan kas belum terjadi. Sementara itu, dalam metode kas, pendapatan baru diakui setelah pembayaran benar-benar diterima, yang menyebabkan adanya selisih dalam laporan keuangan.

### **3. Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya**

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya sebesar Rp4,774,794,176,-. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya pengakuan piutang atas pendapatan dana khusus yang masih harus diterima pada tahun 2023 dan 2024. Dalam sistem akrual, pendapatan diakui ketika hak atas dana tersebut telah diperoleh, meskipun kasnya belum diterima. Namun, dalam pencatatan berbasis kas, pendapatan baru diakui setelah pembayaran benar-benar masuk, sehingga menciptakan selisih antara saldo kas dan saldo akrual.

### **4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU**

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp29,416,751,522,-. Perbedaan ini terjadi karena adanya piutang yang masih harus diterima atas pendapatan jasa layanan perbankan. Dalam metode pencatatan akrual, pendapatan ini telah diakui sebagai hak pemerintah, meskipun pembayaran belum direalisasikan dalam bentuk kas. Sementara itu, dalam metode kas, pendapatan baru diakui

ketika pembayaran telah diterima, sehingga terjadi selisih dalam laporan keuangan.

### 5. Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp243,979,720,-. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya jurnal manual yang dilakukan pada tahun 2024. Akun penerimaan kembali belanja modal BLU tahun anggaran yang lalu seharusnya tidak muncul dalam neraca percobaan akrual satker DJPb. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara pencatatan akrual dan kas dalam laporan keuangan.

### 6. Pendapatan Lain-lain BLU

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Pendapatan Lain-lain BLU sebesar Rp938,832,365,-. Perbedaan ini terjadi karena adanya pengakuan piutang atas pendapatan yang masih harus diterima pada tahun 2023 dan 2024. Dalam metode akrual, pendapatan ini sudah dicatat karena telah menjadi hak pemerintah, meskipun kasnya belum diterima. Sementara dalam metode kas, pendapatan baru diakui setelah pembayaran benar-benar diterima, yang menyebabkan adanya selisih dalam laporan keuangan.

Beban Pegawai  
Rp251.069.390.043,-

### D.3 Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing tercatat sebesar **Rp251.069.390.043,-** dan **Rp220.973.294.660,-**. Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah, namun belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kompensasi ini dapat berupa uang maupun barang yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beban ini tidak mencakup kompensasi yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Uang Makan PNS	45.492.552.850	49.468.474.430	-8,04%
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-1.716.700	-12.999.350	-86,79%
Beban Gaji Pokok PPPK	2.396.292.800	-	100,00%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	36.321	-	100,00%
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	89.380.440	-	100,00%

Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-1.281.440	-	100,00%
Beban Tunjangan Anak PPPK	16.082.072	-	100,00%
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	403.920.000	-	100,00%
Beban Tunjangan Beras PPPK	92.552.760	-	100,00%
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	-289.680	-	100,00%
Beban Uang Makan PPPK	373.674.100	-	100,00%
Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-37.000	-	100,00%
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	6.375.000	-	100,00%
Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	-1.700.000	-	100,00%
Beban Uang Lembur	35.353.831.350	25.848.312.250	36,77%
Pengembalian Beban Uang Lembur		-28.502.350	-100,00%
Beban Uang Lembur PPPK	225.594.900	-	100,00%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	488.348.000	-	100,00%
Beban Gaji dan Tunjangan	166.135.774.270	145.698.009.680	14,03%
<b>Jumlah</b>	<b>251.069.390.043</b>	<b>220.973.294.660</b>	<b>13,62%</b>

Realisasi Beban Pegawai hingga 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 13,62 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan Beban Gaji dan Tunjangan sebesar 14,03 persen serta Beban Uang Lembur yang meningkat sebesar 36,77 persen.

Selain itu, pada tahun 2024 terdapat tambahan beban pegawai terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mencakup Beban Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Beras, serta Uang Makan. Pos tersebut sebelumnya tidak tercatat dalam tahun 2023, sehingga seluruh komponen terkait menunjukkan kenaikan.

Pada beban pegawai terdapat perbedaan Belanja Uang Makan PPPK dan Belanja Uang Makan PNS di LRA dengan beban Belanja Uang Makan PPPK dan Belanja Uang Makan PNS di LO masing-masing sebesar Rp(210,900,-) dan Rp122,331,000,-. Perbedaan ini utamanya disebabkan karena adanya pengakuan belanja pegawai yang masih harus dibayar tahun 2023 dan tahun 2024 serta pengakuan piutang akibat kelebihan bayar uang makan PPPK dan PNS pada tahun 2024.

Beban Persediaan  
Rp13.564.000.704,-

#### D.4 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing tercatat sebesar **Rp13.564.000.704,-** dan **Rp15.571.035.582,-**. Beban Persediaan merupakan beban yang timbul dari konsumsi barang-barang

habis pakai, termasuk barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Beban ini mencerminkan penggunaan persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	13.564.000.704	15.571.035.582	-12,89%
<b>Jumlah</b>	<b>13.564.000.704</b>	<b>15.571.035.582</b>	<b>-12,89%</b>

Beban Barang dan

Jasa

Rp40.080.337.256.561,

-

### D.5 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing tercatat sebesar **Rp40.080.337.256.561,-** dan **Rp20.926.320.742.713,-**. Beban Barang dan Jasa merupakan beban yang timbul akibat konsumsi atas jasa-jasa serta penggunaan barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban ini mencakup berbagai pengeluaran terkait operasional perkantoran, barang habis pakai, jasa profesional, dan pengelolaan dana program tertentu.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	136.651.246.512	120.136.613.862	13,75%
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-4.397.715	-1.999.298	119,96%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.576.456.650	5.798.193.359	13,42%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.914.465.475	2.911.327.432	-34,24%
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		-89.000	-100,00%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	14.768.346.535	29.940.349.200	-50,67%
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-50.689.400	-9.803.300	417,06%
Beban Barang Operasional Lainnya	23.310.973.807	19.001.171.369	22,68%
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-1.096.780	-445.280	146,31%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		66.837.270	-100,00%
Beban Bahan	42.651.404.568	42.774.838.140	-0,29%
Pengembalian Beban Bahan	-626.900	-1.380.500	-54,59%
Beban Honor Output Kegiatan	5.413.495.500	4.616.330.000	17,27%
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	-116.045.500	-72.547.500	59,96%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.585.126.238	4.376.276.509	4,77%
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya		-3.300.000	-100,00%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	983.049.856	286.813.250	242,75%
Beban Langganan Listrik	37.655.094.864	36.833.315.173	2,23%
Pengembalian Beban Langganan Listrik	-10.071.687	-1.097.452	817,73%

Beban Langganan Telepon	3.771.750.920	3.934.535.975	-4,14%
Pengembalian Beban Langganan Telepon	-5.648.891	-53.391	10480,2%
Beban Langganan Air	2.309.718.648	3.016.453.293	-23,43%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	591.454.327	523.185.898	13,05%
Beban Jasa Konsultan	220.950.000	75.750.000	191,68%
Beban Sewa	2.837.226.379	5.364.261.697	-47,11%
Beban Jasa Profesi	4.817.910.283	5.307.194.895	-9,22%
Pengembalian Beban Jasa Profesi	-4.155.000	-855.000	385,96%
Beban Jasa Lainnya	51.036.439.413	52.361.731.989	-2,53%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		12.123.800	-100,00%
Beban Barang	13.017.159.940	11.717.658.497	11,09%
Beban Jasa	58.983.926.746	47.944.587.402	23,03%
Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	39.009.345.248.702	20.321.993.935.922	91,96%
Beban Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	659.088.543.071	207.406.480.901	217,78%
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19		12.347.601	-100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>40.080.337.256.561</b>	<b>20.926.320.742.713</b>	<b>91,52%</b>

Realisasi Beban Barang dan Jasa hingga 31 Desember 2024 mengalami peningkatan signifikan sebesar 91,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh lonjakan beban pengelolaan dana terkait program pemerintah, termasuk Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang meningkat 91,96 persen dan Beban Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup yang naik 217,78 persen.

Pada beban barang dan jasa terdapat perbedaan nilai antara LRA dan LO dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Terdapat perbedaan antara saldo kas dan saldo akrual pada akun Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp(6,018,193,-). Perbedaan ini terjadi karena adanya tagihan pengiriman surat dinas yang telah digunakan tetapi belum dibayarkan hingga akhir periode pelaporan. Pengakuan beban pengiriman surat dilakukan secara akrual karena layanan telah diberikan, tetapi pembayaran kasnya masih tertunda. Hal ini menyebabkan saldo kas lebih rendah dibandingkan saldo akrual.

### 2. Belanja Langganan Listrik

Terdapat perbedaan saldo antara kas dan akrual pada akun Belanja Langganan Listrik sebesar Rp(138,630,365,-). Selisih ini disebabkan oleh adanya tagihan listrik yang telah diakui sebagai beban dalam laporan akrual

tetapi belum dibayarkan hingga akhir periode. Sistem pembayaran listrik umumnya dilakukan secara berkala, sehingga pemakaian listrik yang terjadi pada akhir tahun tetap dicatat sebagai beban meskipun belum direalisasikan dalam bentuk pembayaran kas. Akibatnya, saldo akrual lebih tinggi dibandingkan saldo kas.

### 3. Belanja Langganan Telepon

Pada akun Belanja Langganan Telepon, terjadi perbedaan saldo kas dan akrual sebesar Rp(15,391,269-). Perbedaan ini terjadi akibat adanya pengakuan biaya langganan telepon yang telah digunakan tetapi belum dibayarkan. Penyedia layanan telekomunikasi umumnya menerapkan sistem tagihan bulanan yang bisa saja baru dibayar pada bulan berikutnya, sehingga dalam metode akrual beban tersebut telah diakui, tetapi dalam metode kas, pembayaran belum direalisasikan.

### 4. Belanja Langganan Air

Terdapat perbedaan saldo pada akun Belanja Langganan Air sebesar Rp(151,915,752,-). Perbedaan ini disebabkan oleh tagihan langganan air yang telah dicatat sebagai beban akrual karena air telah digunakan, tetapi pembayaran kasnya belum dilakukan. Dalam banyak kasus, pembayaran tagihan air dilakukan pada bulan berikutnya setelah penggunaan, sehingga menyebabkan saldo akrual lebih tinggi dibandingkan saldo kas.

Beban Pemeliharaan  
Rp325.894.723.183,-

### D.6 Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing tercatat sebesar **Rp325.894.723.183,-** dan **Rp302.501.989.112,-**. Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi operasional yang optimal. Beban ini mencakup pemeliharaan gedung, peralatan, serta penyediaan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-5.377.755		100,00%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.097.617.355	53.138.417.123	9,33%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.726.062.964	3.241.181.441	-15,89%

Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-75.000		100,00%
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-1.913.000	-7.819.000	-75,53%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	262.383.656.898	243.919.626.384	7,57%
Beban Pemeliharaan	1.945.454.637	1.570.750.263	23,86%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	749.297.084	639.832.901	17,11%
<b>Jumlah</b>	<b>325.894.723.183</b>	<b>302.501.989.112</b>	<b>7,73%</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp147.398.704.480,-

### D.7 Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing tercatat sebesar **Rp147.398.704.480,-** dan **Rp150.633.639.040,-**. Beban Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, baik untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan dinas.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-125.886.964	-54.056.569	132,88%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	96.786.116.811	93.179.075.051	3,87%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.673.805.887	5.076.805.160	-7,94%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-1.554.000	-1.098.000	41,53%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	-3.390.000	-7.470.000	-54,62%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.573.777.000	10.715.197.770	-29,32%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-1.302.000	-560.000	132,50%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.331.277.701	6.091.227.300	-12,48%
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.682.249.600	2.150.487.399	-21,77%
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri		-5.685.800	-100,00%
Beban Perjalanan	31.483.610.445	33.489.716.729	-5,99%
<b>Jumlah</b>	<b>147.398.704.480</b>	<b>150.633.639.040</b>	<b>-2,15%</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp347.384.124.274,-

### D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing tercatat sebesar **Rp347.384.124.274,-** dan **Rp312.966.366.427,-**. Beban Penyusutan merupakan pengeluaran yang mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tersebut. Sementara itu, Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi atas Aset Tak Berwujud dalam periode yang telah ditentukan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	182.109.482.593	162.570.810.647	12,02%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		34.781.749	-100,00%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	101.347.971.926	95.161.513.076	6,51%
Beban Penyusutan Irigasi	4.386.459	4.386.459	0,00%
Beban Penyusutan Jaringan	12.834.442	12.834.442	0,00%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	155.076.610	2.491.075	6125,29%
Beban Amortisasi Software	14.079.957.161	4.177.059.966	237,08%
Beban Amortisasi Lisensi	49.367.764.550	50.749.126.065	-2,72%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan		67.908.841	-100,00%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	297.255.460	185.454.107	60,29%
<b>Jumlah</b>	<b>347.374.729.201</b>	<b>312.966.366.427</b>	<b>10,99%</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak tertagih  
Rp425.627.991.464,-

### D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing tercatat sebesar **Rp425.627.991.464,-** dan **Rp103.401.534.071,-**. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang dicatat untuk mengantisipasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode akuntansi. Beban ini bertujuan untuk mencerminkan estimasi piutang yang tidak dapat dipulihkan, baik dari piutang operasional maupun piutang lainnya.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	892.736	-1.402.119	-136,88%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU	378.259.039.414	95.995.937.444	174,60%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU	86.876.584	32.172.368	25,54%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan	-60.359	60.359	-200,00%
Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan	47.281.803.489	7.171.349.020	559,32%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	-560.400	203.416.999	-100,28%
<b>Jumlah</b>	<b>425.627.991.464</b>	<b>103.401.534.071</b>	<b>311,63%</b>

Surplus/Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional Surplus  
Rp113.323.930.866,-

### D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing tercatat sebesar **Rp113.323.930.866,-** dan **Rp96.867.632.624,-**. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional mencakup pendapatan dan beban yang bersifat tidak rutin serta tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama entitas.

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>2.802.026.854</b>	<b>2.375.416.012</b>	
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	70.352.900	245.770.774	-71,37%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.885.034.251	1.660.203.565	13,54%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	846.639.703	469.441.673	80,35%
<b>Beban dari Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>4.501.112.021</b>	<b>5.752.304.252</b>	
Beban Pelepasan Aset	4.501.112.021	5.752.304.252	-21,75%
<b>Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(1,699,085,167)</b>	<b>(3,376,888,240)</b>	<b>-49,68%</b>
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>127.158.427.083</b>	<b>100.433.320.167</b>	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	77.760.000	0	100,00%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	312.529.050	255.816.900	22,17%
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.776.803.855	149.333.057	1089,83%
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang NonTP/TGR Pensiunan PNS	4.000.000	7.625.560	-47,54%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.840.400	4.290.850	-57,11%
Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang	124.985.493.778	100.016.253.800	-100,00%
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>12.135.411.051</b>	<b>188,799,303</b>	
Beban Persediaan Rusak/Usang	121.569.716	188.722.903	-35,58%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.635.400	76.400	2040,58%
Beban Lain-Lain	12.012.205.935	0	100,00%
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>115.023.016.032</b>	<b>100.244.520.864</b>	<b>14,74%</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>113.323.930.866</b>	<b>96.867.632.624</b>	<b>16,99%</b>

Pada pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya terdapat perbedaan antara nilai LRA dan LO dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp30,000,000,-. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya limpahan setoran yang awalnya berasal dari satuan kerja (satker) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu), namun kemudian dikoreksi dan dialihkan ke satuan kerja Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanpus DJPb). Koreksi pencatatan ini menyebabkan perbedaan dalam saldo antara metode akrual dan kas.

## **2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu**

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp28,652,806,-. Perbedaan ini terjadi akibat adanya pengembalian belanja barang yang dilakukan melalui mekanisme potongan Surat Perintah Membayar (SPM) Rupiah Murni Anggaran Tahun Anggaran (RPATA). Potongan ini hanya berdampak pada pencatatan di ledger kas, sementara dalam metode akrual, transaksi tersebut tetap diakui sebagai penerimaan yang memengaruhi saldo akrual. Hal ini menyebabkan adanya selisih antara saldo kas dan saldo akrual.

## **3. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu**

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp68,088,490,-. Perbedaan ini terjadi karena adanya jurnal manual yang dilakukan pada tahun 2024. Akun penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu seharusnya tidak muncul dalam neraca percobaan akrual satker DJPb. Koreksi jurnal ini menyebabkan adanya selisih antara saldo kas dan akrual dalam laporan keuangan.

## **4. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji**

Terdapat perbedaan saldo kas dan akrual pada akun Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp57,197,160,-. Perbedaan ini disebabkan oleh saldo uang muka gaji yang masih tercatat dalam sistem Treasury Keuangan (TK) dan perlu dialihkan ke satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu). Pengembalian uang muka gaji ini menyebabkan adanya selisih antara pencatatan berbasis kas dan pencatatan berbasis akrual, karena dalam metode akrual, pendapatan sudah diakui, tetapi dalam metode kas, penerimaan tersebut baru dicatat setelah dana benar-benar diterima.

Surplus/Defisit LO  
Rp(10.601.869.645.028  
),-

## **D.11 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL**

Saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp(10.601.869.645.028),-** dan surplus sebesar **Rp13.655.089.636.786,-**. Pos

Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional serta Pos Luar Biasa.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal*  
*Rp55.683.836.703.776,-*

Saldo Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp55.683.836.703.776,- dan **Rp40.653.782.064.617,-**.

### E.2 Surplus/Defisit LO

*Defisit LO*  
*Rp10.601.869.645.028,-*

**Defisit LO** untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.601.869.645.028,- dan **surplus LO** pada 31 Desember 2023 sebesar Rp13.655.089.636.786,-. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

*Dampak Kumulatif*  
*Perubahan*  
*Kebijakan Akuntansi*  
*Rp0*

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

#### E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai Aset*  
*Rp0*

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

#### E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai Persediaan*  
*Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp(252.230.220,-).

#### E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

*Koreksi atas*  
*Reklasifikasi Rp0*

Koreksi atas Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi atas perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar agar sesuai dengan yang seharusnya. Tidak terdapat Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Selisih Revaluasi Aset  
Rp0

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi Rp  
Rp(860.351.667,-)

#### E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi Aset, namun bukan diakibatkan revaluasi nilai, misalnya koreksi aset atas temuan auditor, reklasifikasi antar-aset yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat aset, maupun penyebab koreksi nilai aset non-revaluasi lainnya. Koreksi Penilaian Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(860.351.667,-) dan Rp(20.035.435,-).

Lain-Lain  
Rp(20.717.732.321,-)

#### E.4.6 Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas Pendapatan, koreksi atas Beban, koreksi atas Hibah, koreksi atas Piutang, dan koreksi atas Kewajiban. Adapun nilai Koreksi Lain- Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(20.717.732.321,-) dan Rp1.028.743.629,-.

Transaksi Antar Entitas surplus  
Rp1.363.736.367.415,-

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar surplus Rp1.363.736.367.415,- dan Rp1.374.208.524.399,-. Rincian Transaksi Antar Entitas sebagai berikut.

No	Uraian Akun	31 Desember 2024	
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp	1,362,561,426,044
2	Diterima dari Entitas Lain	Rp	(8,876,728,294)
3	Transfer Keluar	Rp	(160,625,066,441)
4	Transfer Masuk	Rp	168,852,905,606
5	Pengesahan Hibah Langsung	Rp	835,696,500
6	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	Rp	988,134,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>1,363,736,367,415</b>

Penjelasan akun-akun Transaksi Antar Entitas sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan nilai realisasi neto belanja;
2. Diterima dari Entitas Lain merupakan nilai realisasi neto PNBPN, namun tidak termasuk realisasi PNBPN BPDP Kelapa sawit dan BPD Lingkungan Hidup;
3. Transfer Keluar merupakan nilai transaksi transfer keluar BMN (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
4. Transfer Masuk merupakan nilai transaksi transfer masuk BMN (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
5. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp835.696.500,- merupakan nilai realisasi pada satuan kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp500.000.000,-, KPPN Nunukan sebesar Rp175.050.000,-, KPPN Benteng sebesar Rp40.172.500,-, dan pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp120.474.000,-.
6. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu Sebesar Rp988.134.000,- merupakan realisasi pada satuan kerja KPPN Banjarmasin sebesar Rp18.334.000,-, dan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar Rp969.800.000,-.

*DDEL*

*Rp8.876.728.294,-*

*DKEL*

*Rp1.362.561.426.044,-*

#### **E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar-entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp8.876.728.294,- sedangkan DKEL sebesar Rp1.362.561.426.044,-.

*Transfer Masuk*

*Rp160.625.066.441,-*

*Transfer Keluar*

*Rp168.852.905.606,-*

#### **E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal kementerian atau lembaga, antar kementerian atau lembaga, dan antara kementerian atau lembaga dengan BA-BUN. Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp160.625.066.441,- dan Rp168.852.905.606,-. Adapun rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Pengesahan Hibah  
Langsung  
Rp835.696.500,-*

### **E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung entitas dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. PengesahaHibah Langsung per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp835.696.500,- yang merupakan hibah barang pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp500.000.000,-, KPPN Benteng sebesar Rp40.172.500,-, KPPN Nunukan sebesar Rp175.050.000,-, dan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara Rp120.474.000,-.

*Ekuitas Akhir  
Rp46.424.125.342.175,-*

### **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.424.125.342.175,- dan Rp55.683.836.703.776,-.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 Piloting Penggabungan DIPA

Telah dilakukan penggabungan DIPA Satker Unit Layanan dan Unit Induk sesuai dengan Kepdirjen Nomor 94 Tahun 2023 tentang Pilotting Penggabungan Pengelolaan Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Petunjuk Teknis Penggabungan Pengelolaan Anggaran pada KPPN Tahun 2024.

### F.2 Pengungkapan Capaian Kinerja

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (CD)  
Program PPKNR telah terealisasi sebesar Rp68.148.504.158 atau 85,89 persen dari pagu sebesar Rp79.342.053.000 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Belanja			Keluaran		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	progress
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4802	AEF	Komunikasi dan Edukasi Peningkatan Kinerja Investasi Pemerintah	orang	6.660.000	6.502.300	97,63%	30	40	133,33%
		Komunikasi dan Edukasi Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Mengenai Investasi Pemerintah	orang	804.646.000	748.201.797	92,99%	267	267	100%
AEF Total				811.306.000	754.704.097	93,02%	297	307	103,37%
4802 Total				811.306.000	754.704.097	93,02%	297	307	103,37%
4803	ABA	Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah	Kajian	1.643.690.000	1.425.582.353	86,73%	68	94	138,24%
ABA Total				1.643.690.000	1.425.582.353	86,73%	68	94	138,24%
	FAE	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	Rekomendasi	2.831.978.000	2.352.966.952	83,09%	420	544	129,52%
		Rekomendasi atas Pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP)	Rekomendasi	2.583.350.000	2.256.116.984	87,33%	2	2	100%
FAE Total				5.415.328.000	4.609.083.936	85,11%	428	546	127,57%
4803 Total				7.059.018.000	6.034.666.289	85,49%	496	640	129,03%
4804	AED	Penetapan/Perjanjian Investasi Pemerintah dengan OIP	perjanjian	80.950.000	21.157.500	26,14%	2	2	100%
		Perjanjian Terkait Investasi Pemerintah	perjanjian	18.000.000	17.751.000	98,62%	15	15	100%
AED Total				98.950.000	38.908.500	39,32%	17	17	100%
	FAE	Kajian dan Rekomendasi Penetapan Operator Investasi Pemerintah (OIP)	Rekomendasi	279.900.000	247.650.000	88,48%	2	2	100%
		Kajian dan Rekomendasi Terkait Investasi Pemerintah	Rekomendasi	1.411.258.000	1.207.941.276	85,59%	8	8	100%
		Rekomendasi Outstanding Pinjaman	Rekomendasi	59.807.000	56.788.065	94,95%	38	44	115,79%
FAE Total				1.750.965.000	1.512.379.341	86,37%	48	54	112,50%
	FAH	Konsolidasi LK K/L dan LK BUN	Laporan	2.220.000	1.886.000	84,95%	39	39	100%
FAH Total				2.220.000	1.886.000	84,95%	39	39	100%
	FAL	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana	Dokumen	1.220.000	1.211.800	99,33%	100	120	120%
FAL Total				1.220.000	1.211.800	99,33%	100	120	120%
	UAE	Perluasan Cakupan Penyaluran Melalui Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMi (PN)	Laporan	1.422.999.000	1.333.651.518	93,72%	5	5	100%
UAE Total				1.422.999.000	1.333.651.518	93,72%	5	5	100%
4804 Total				3.276.354.000	2.888.037.159	88,15%	209	235	112,44%
4805	FAH	Laporan Keuangan BA BUN 999.03, 999.04, 999.07	Laporan	32.541.000	32.194.000	98,93%	3	3	100%
FAH Total				32.541.000	32.194.000	98,93%	3	3	100%
4805 Total				32.541.000	32.194.000	98,93%	3	3	100%
4806	AAG	Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Menteri Mengenai Investasi Pemerintah	PerMen	34.600.000	34.135.000	98,66%	4	4	100%
AAG Total				34.600.000	34.135.000	98,66%	4	4	100%
	AAH	Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Lainnya Mengenai Investasi Pemerintah	peraturan	173.875.000	168.099.000	96,68%	2	2	100%
AAH Total				173.875.000	168.099.000	96,68%	2	2	100%
4806 Total				591.095.000	202.234.000	34,21%	7	7	100%
6212	AEF	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	orang	359.692.000	359.476.500	99,94%	75	75	100%
AEF Total				359.692.000	359.476.500	99,94%	75	75	100%

	BMB	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	kegiatan	1.459.114.000	1.328.288.040	91,03%	5	5	100%
		Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	kegiatan	412.790.000	335.520.300	81,28%	1	1	100%
BMB Total				1.871.904.000	1.663.808.340	88,88%	6	6	100%
	FAC	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU	orang	1.436.457.000	1.265.338.856	88,09%	3.819	4029	105,50%
		Edukasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	UnitKerja	1.440.570.000	1.434.402.710	99,57%	173	173	100%
		Edukasi Satker terkait Peningkatan Fungsi Aplikasi BIOS	UnitKerja	80.700.000	80.700.000	100,00%	248	248	100%
		Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi	UnitKerja	6.716.751.000	6.042.273.452	89,96%	19424	23453	120,74%
		Penajaman Metode Analytical BLU	UnitKerja	141.980.000	138.953.000	97,87%	1	1	100%
		Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU	orang	516.960.000	397.393.000	76,87%	50	50	100%
		Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan	orang	1.111.289.000	1.103.606.660	99,31%	19213	19213	100%
FAC Total				11.594.812.000	10.462.667.678	90,24%	43.257	47.167	109,04%
	FAH	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	Laporan	6.341.009.000	5.960.267.674	94,00%	712	913	128,23%
		Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)	Laporan	671.388.000	590.518.570	87,95%	265	310	116,98%
		Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN	Laporan	1.174.219.000	1.091.407.396	92,95%	352	392	111,36%
FAH Total				8.351.500.000	7.642.193.640	91,51%	1.353	1.615	119,36%
	FAL	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas	kegiatan	633.722.000	437.852.362	69,09%	10	10	100,00%
		Konsultasi Pencairan Dana	kegiatan	9.517.631.000	8.518.247.094	89,50%	1.742	2.091	120,03%
		Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	kegiatan	2.997.730.000	2.548.391.447	85,01%	265	310	116,98%
		Pengembangan Treasury Billing System (TBS) dalam rangka Penerimaan Negara secara Elektronik (PU)	Dokumen	108.900.000	56.979.392	52,32%	1.500	1.500	100%
FAL Total				13.727.732.000	11.561.470.295	84,22%	3.555	3.911	110,01%
	UAL	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	Dokumen	67.822.000	56.629.051	83,50%	5.000	5.000	100%
UAL Total				67.822.000	56.629.051	83,50%	5.000	5.000	100%
6212 Total				35.973.462.000	31.746.245.504	88,25%	53.246	57.774	108,50%
6213	FAC	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan	orang	1.935.081.000	1.475.077.019	76,23%	1.874	2.521	134,53%
FAC Total				1.935.081.000	1.475.077.019	76,23%	1.874	2.521	134,53%
	FAE	ALCo Regional	Rekomendasi	2.932.668.000	2.608.857.613	88,96%	33	88	266,67%
		Monev Pengelolaan Kas Negara	Rekomendasi	386.075.000	277.752.391	71,94%	2	2	100%
		Rekomendasi atas Peningkatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah	Rekomendasi	2.606.751.000	1.985.330.204	76,16%	8	8	100%
		Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	Rekomendasi	280.624.000	265.980.000	94,78%	2	2	100%
		Rekomendasi Terkat Kemitraan dengan Perbankan	Rekomendasi	97.955.000	79.784.274	81,45%	2	2	100%
FAE Total				6.420.077.000	5.217.704.482	81,27%	48	102	212,50%
	FAH	Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	Laporan	28.799.000	27.850.775	96,71%	1	1	100%
FAH Total				28.799.000	27.850.775	96,71%	1	1	100%
	FAL	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas	kegiatan	1.342.296.000	1.132.279.644	84,35%	239	386	161,51%
		Rekomendasi atas Pelaksanaan Disbursement	Dokumen	68.092.000	65.560.000	96,28%	4	4	100%
		Reviu Belanja Pemerintah	Dokumen	5.761.539.000	5.202.592.601	90,30%	309	519	167,96%
FAL Total				7.473.495.000	6.400.432.245	85,64%	564	909	161,17%
6213 Total				15.857.452.000	13.121.064.521	82,74%	2.487	3.533	142,06%
6214	FAL	Dana Hasil dari Pengelolaan Kas Negara	Dokumen	443.710.000	262.596.887	59,18%	5,5 miliar	5,5 miliar	100,00%
		Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen	700.643.000	524.293.133	74,83%	222	359	161,71%
		Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana	Dokumen	598.667.000	525.451.703	87,77%	493.963	1.283.513	259,84%
FAL Total				1.768.984.000	1.312.341.723	74,19%	5,5 miliar	5,5 miliar	100%
6214 Total				1.768.984.000	1.312.341.723	74,19%	5,5 miliar	5,5 miliar	100%
6215	FAH	Government Financial Statistic (GFS)	Laporan	1.310.538.000	1.130.435.359	86,26%	148	178	120,07%
		Laporan Keuangan BUN	Laporan	1.571.253.000	1.361.223.807	86,63%	845	845	100%
		Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	Laporan	548.437.000	514.589.930	93,83%	3	3	100%
FAH Total				3.545.795.000	3.006.249.096	84,78%	1016	1026	100,98%
6215 Total				3.545.795.000	3.006.249.096	84,78%	1016	1026	100,98%
6216	AAA	RUU P2 APBN	RUU	573.379.000	560.520.440	97,76%	1	1	100%
AAA Total				573.379.000	560.520.440	97,76%	1	1	100%
	AAC	RPP Pelaksanaan Anggaran	RPP	11.997.000	-	0,00%	1	1	100%
AAC Total				11.997.000	-	0,00%	1	1	100%
	AAG	Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	PerMen	339.600.000	211.864.200	62,39%	30	30	100%
		Peraturan Menteri Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	PerMen	572.172.000	362.640.070	63,38%	3	3	100%

AAG Total				911.772.000	574.504.270	63,01%	33	33	100%
AAH	Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	peraturan	3.766.063.000	3.594.360.765	95,44%	9	10	111,11%	
	Peraturan dan Ketetapan Lainnya Mengenai Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah	peraturan	88.375.000	71.095.000	80,45%	2	2	100%	
	Peraturan Lainnya Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	peraturan	181.780.000	157.380.000	86,58%	2	2	100%	
	Peraturan Lainnya Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	peraturan	340.974.000	262.289.000	76,92%	3	3	100%	
AAH Total			4.377.192.000	4.085.124.765	93,33%	16	17	106,25%	
FAE	Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial	Rekomendasi	333.490.000	333.383.712	99,97%	1	1	100%	
	Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan	Laporan	335.740.000	260.312.488	77,53%	10	10	100%	
	Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	Rekomendasi	3.458.025.000	2.906.133.273	84,04%	2	2	100%	
	Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia	Rekomendasi	178.800.000	150.850.000	84,37%	1	1	100%	
	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan	Rekomendasi	239.451.000	179.938.821	75,15%	33	48	145,45%	
FAE Total			4.551.706.000	3.830.618.294	84,16%	48	62	129,17%	
6216 Total			10.426.046.000	9.050.767.769	86,81%	99	114	115,15%	
CD Total			79.342.053.000	68.148.504.158	85,89%	5.500.559.273	5.501.347.511	100,01%	

## 2. Program Dukungan Manajemen (WA)

Program Dukungan Manajemen telah terealisasi sebesar Rp 28.998.648.311.287 atau 85,65 persen dari pagu sebesar Rp 33.855.319.704.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Belanja			Keluaran		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711	EBA	Layanan Bantuan Hukum	Layanan	285.656.000	237.688.805	83,21%	1	1	100%
EBA Total				285.656.000	237.688.805	83,21%	1	1	100%
4711 Total				285.656.000	237.688.805	83,21%	1	1	100%
4712	FAM	Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	Rupiah	117.000.000.000	94.078.252.292	80,41%	90	90	100%
		Pendanaan untuk Peremajaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	Hektar	1.345.000.000.000	822.156.333.832	61,13%	38.543	38.543	100%
		Pendanaan untuk Promosi dan Kemitraan Sawit	Rupiah	147.600.000.000	86.527.620.320	58,62%	90	90	100%
		Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	Rupiah	145.000.000.000	44.859.373.428	30,94%	16.000	16.000	100%
		Pendanaan untuk SDM Perkebunan Kelapa Sawit	orang	322.000.000.000	275.929.045.443	85,69%	9.500	9.500	100%
		PNBP/Imbal Hasil Kelola Dana BLU	Milyar	9.200.000.000	5.070.851.081	55,12%	989	989	100%
FAM Total				2.085.800.000.000	1.328.621.476.396	63,70%	65.212	65.212	100%
	UAM	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	Rupiah	29.391.038.588.000	25.848.776.936.986	87,95%	9.402.000	9.402.000	100%
UAM Total				29.391.038.588.000	25.848.776.936.986	87,95%	9.402.000	9.402.000	100%
4712 Total				31.476.838.588.000	27.177.398.413.382	86,34%	9.467.212	9.467.212	100%
4713	FAM	PNBP/Imbal Hasil Kelola Dana BLU	Milyar	72.144.000	64.750.320	89,75%	336	535	159,17%
FAM Total				72.144.000	64.750.320	89,75%	336	535	159,17%
	UAM	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMI (PN)	UsahaMikro	23.219.898.000	23.117.903.283	99,56%	2.200.000	2.208.840	100,40%
UAM Total				23.219.898.000	23.117.903.283	99,56%	2.200.000	2.208.840	100,40%
4713 Total				23.292.042.000	23.182.653.603	99,53%	2.200.336	2.209.375	100,41%
4714	FAM	PNBP/Imbal Hasil Kelola Dana BLU	Milyar	3.813.683.000	873.148.283	22,90%	345	1.175	340,31%
FAM Total				3.813.683.000	873.148.283	22,90%	345	1.175	340,31%
	UAM	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup (PN)	orang	8.420.708.000	5.525.046.998	65,61%	5.000	18.000	360,00%
		Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup (PN)	Milyar	665.989.312.000	326.093.990.696	48,96%	100	690	690,47%
UAM Total				674.410.020.000	331.619.037.694	49,17%	5.100	18.690	366,48%
4714 Total				678.223.703.000	332.492.185.977	49,02%	5.445	19.866	364,82%
4715	CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	6.559.485.000	5.929.827.460	90,40%	173	173	100,00%
CAN Total				6.559.485.000	5.929.827.460	90,40%	173	173	100,00%
	EBA	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	Layanan	12.401.658.000	10.228.919.155	82,48%	230	230	100,00%

		Kerumahtanggaan	Layanan	17.840.516.000	16.179.291.245	90,69%	231	231	100,00%
		Layanan Perkantoran	Layanan	339.761.584.000	322.409.528.173	94,89%	254	254	100,00%
		Rencana Kebutuhan BMN dan Pengeloannya Unit	Dokumen	2.713.400.000	2.276.568.393	83,90%	2	2	100,00%
EBA Total				378.207.997.000	351.094.306.966	92,83%	729	717	98,35%
	EBB	Kendaraan Bermotor	Unit	41.609.988.000	41.255.883.312	99,15%	141	141	100,00%
		Gedung/Bangunan	m2	183.129.980.000	171.172.708.168	93,47%	55.236	54.850	99,30%
		Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	93.883.335.000	87.214.773.311	92,90%	9.362	9.362	100,00%
EBB Total				330.895.642.000	299.643.364.791	90,56%	66.095	64.353	97,37%
	EBD	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	Dokumen	4.361.188.000	3.396.830.918	77,89%	483	483	100,00%
		Dokumen Perbendaharaan Unit	Dokumen	2.366.187.000	1.426.192.147	60,27%	1	1	100,00%
		Laporan Keuangan Unit	Laporan	1.622.191.000	1.394.164.393	85,94%	69	69	100,00%
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1.287.320.000	1.093.386.400	84,94%	4	4	100,00%
		Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	3.447.012.000	2.433.864.156	70,61%	430	430	100,00%
EBD Total				13.220.918.000	9.744.438.014	73,70%	1.003	987	98,40%
4715 Total				728.884.042.000	666.411.937.231	91,43%	68.000	66.230	97,40%
4716	CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	879.057.000	761.910.300	86,67%	10	10	100%
CAN Total				879.057.000	761.910.300	86,67%	10	10	100%
	EBA	Dukungan Pimpinan dan Keptokoleran	Layanan	304.116.000	291.246.154	95,77%	1	1	100%
		Kerumahtanggaan	Layanan	2.989.700.000	2.975.788.501	99,53%	1	1	100%
		Layanan Perkantoran	Layanan	7.888.872.000	7.767.784.239	98,47%	1	1	100%
EBA Total				11.182.688.000	11.034.818.894	98,68%	3	3	100%
	EBB	Gedung/Bangunan	M <sup>2</sup>	1.319.341.000	1.319.173.689	99,99%	207	207	100%
		Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	910.234.000	901.084.251	98,99%	22	22	100%
EBB Total				2.300.576.000	396.977.578	17,26%	229	20	8,73%
	EBD	Dokumen Perbendaharaan Unit	Dokumen	18.384.000	18.120.948	98,57%	1	1	100%
		Laporan Keuangan Unit	Laporan	266.933.000	262.643.402	98,39%	3	3	100%
		Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	29.168.000	8.130.788	27,88%	1	1	100%
EBD Total				314.485.000	288.895.138	91,86%	5	5	100%
4716 Total				14.605.805.000	14.305.882.272	97,95%	247	247	100%
4717	CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	10.301.802.000	4.249.869.929	41,25%	338	338	100%
CAN Total				10.301.802.000	4.249.869.929	41,25%	338	338	100%
	EBA	Kerumahtanggaan	Layanan	1.571.638.000	851.957.262	54,21%	1	1	100%
		Layanan Perkantoran	Layanan	12.666.985.000	10.313.152.062	81,42%	1	1	100%
EBA Total				14.238.623.000	11.165.109.324	78,41%	2	2	100%
	EBB	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	270.943.000	269.253.971	99,38%	71	71	100%
EBB Total				270.943.000	269.253.971	99,38%	71	71	100%
	EBD	Laporan Keuangan Unit	Laporan	467.730.000	372.354.241	79,61%	1	1	100%
		Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	50.079.000	18.690.000	37,32%	1	1	100%
EBD Total				517.809.000	391.044.241	75,52%	2	2	100%
4717 Total				25.329.177.000	16.075.277.465	63,47%	413	413	100%
4718	BMB	Implementasi PUG	kegiatan	460.888.000	401.170.500	87,04%	1	1	100%
		Kehumasan	kegiatan	4.871.960.000	3.366.050.303	69,09%	308	470	152,60%
		Pembinaan/Edukasi Publik	kegiatan	6.033.495.000	5.222.868.792	86,56%	432	613	146,65%
BMB Total				11.366.343.000	8.990.089.595	79,09%	741	1.084	146,29%
4718 Total				11.366.343.000	8.990.089.595	79,09%	741	1.084	146,29%
4719	EBA	Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	Laporan	1.175.364.000	1.068.736.800	90,93%	345	399	115,65%
		Implementasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuaapan	Dokumen	338.040.000	337.211.070	99,75%	1	1	100,00%
		Layanan Perkantoran	Layanan	85.874.483.000	79.574.664.943	92,66%	208	208	100,00%
		Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	Rekomendasi	23.543.326.000	18.095.383.344	76,86%	431	463	107,42%
		Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	Dokumen	886.377.000	814.106.465	91,85%	440	470	106,82%
		Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM	Dokumen	440.936.000	254.490.201	57,72%	4	4	100,00%
EBA Total				113.807.668.000	100.144.592.823	87,99%	1.454	1.545	106,26%
	EBC	Administrasi Kepegawaian	orang	28.581.741.000	25.509.256.405	89,25%	1.253	1.253	100%
		Pengelolaan Jabatan Fungsional	orang	193.200.000	162.973.400	84,35%	12	12	100%
		Pengembangan SDM	orang	21.723.887.000	18.214.400.106	83,85%	5.327	6.938	130,24%
EBC Total				50.747.898.000	43.886.629.911	86,48%	6.698	8.203	122,47%
4719 Total				164.555.566.000	144.031.222.734	87,53%	8.152,00	9.748	119,58%
4720	EBA	Layanan Perkantoran	Layanan	43.438.993.000	43.215.513.736	99,49%	1	1	100%

EBA Total				43.438.993.000	43.215.513.736	99,49%	1	1	100%
	EBC	Pengembangan SDM	orang	6.877.418.000	6.837.365.684	99,42%	49	49	100%
EBC Total				6.877.418.000	6.837.365.684	99,42%	49	49	100%
4720 Total				50.316.411.000	50.052.879.420	99,48%	50	50	100%
4721	AAH	Peraturan Lainnya terkait Organisasi	peraturan	96.887.000	1.330.000	1,37%	10	10	100%
AAH Total				96.887.000	1.330.000	1,37%	10	10	100%
	EBA	Administrasi Kepegawaian	Layanan	56.951.000	34.152.198	59,97%	78	78	100%
		Layanan Perkantoran	Layanan	61.028.043.000	53.885.125.165	88,30%	1	1	100%
EBA Total				61.084.994.000	53.919.277.363	88,27%	79	79	100%
	EBC	Pengembangan SDM	orang	809.417.000	552.995.689	68,32%	65	65	100%
EBC Total				809.417.000	552.995.689	68,32%	65	65	100%
4721 Total				61.991.298.000	54.473.603.052	87,87%	154	154	100%
4722	EBA	Rekomendasi Manajemen Risiko	Laporan	1.350.000	1.350.000	100%	1	1	100%
		Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Laporan	3.856.000	440.000	11,41%	1	1	100%
EBA Total				5.206.000	1.790.000	34,38%	2	2	100%
	EBD	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Laporan	825.414.000	642.631.866	77,86%	1	1	100%
		Rekomendasi Manajemen Risiko	Laporan	117.750.000	82.847.073	70,36%	1	1	100%
		Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Laporan	438.678.000	350.417.824	79,88%	72	103	143,06%
EBD Total				1.394.726.000	1.075.896.763	77,14%	76	105	138,16%
4722 Total				1.356.707.000	701.279.048	51,69%	78,00	73,17	93,81%
4723	EBD	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Laporan	438.476.000	436.381.142	99,52%	12	12	100%
EBD Total				438.476.000	436.381.142	99,52%	12	12	100%
4723 Total				438.476.000	436.381.142	99,52%	12	12	100%
4724	EBA	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Laporan	220.808.000	162.255.971	73,48%	2	2	100%
		Rekomendasi Manajemen Risiko	Laporan	362.715.000	28.577.148	7,88%	3	3	100%
		Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Laporan	176.482.000	81.061.602	45,93%	2	2	100%
EBA Total				760.005.000	271.894.721	35,78%	7	7	100%
4724 Total				760.005.000	271.894.721	35,78%	7	7	100%
4725	CCL	Operational Maintenance Sistem Aplikasi BUN	Unit	90.362.906.000	90.059.025.442	99,66%	10	10	100%
		Operational Maintenance Sistem Aplikasi Perbendaharaan	Unit	38.747.302.000	38.747.301.299	100,00%	6	6	100%
		Operational Maintenance Sistem Aplikasi Satker	Unit	109.167.982.000	109.046.260.494	99,89%	9	9	100%
CCL Total				238.278.190.000	237.852.587.235	99,82%	25	25	100%
	FAB	Sistem Aplikasi BUN	Modul Aplikasi	6.363.467.000	4.819.334.658	75,73%	3	3	100%
		Sistem Aplikasi Perbendaharaan	Modul Aplikasi	3.238.854.000	2.239.006.837	69,13%	2	2	100%
		Sistem Aplikasi Satker	Modul Aplikasi	4.711.030.000	3.269.170.836	69,39%	1	1	100%
		Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Gen. 2	Sistem Informasi	845.043.000	832.041.750	98,46%	1	1	100%
		Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)	Sistem Informasi	492.833.000	444.928.500	90,28%	1	1	100%
		Sistem Monev Kinerja Anggaran Belanja K/L Terintegrasi (IKPA dan EKA)	Modul Aplikasi	307.365.000	257.747.000	83,86%	2	2	100%
		Sistem Pengelolaan Data Analitik	Sistem Informasi	1.036.683.000	799.920.500	77,16%	1	1	100%
		SIT dan UAT Ulang Sistem Pembayaran Collecting Agent (PU)	Layanan	85.727.000	76.359.535	89,07%	75	75	100%
FAB Total				168.216.166.000	163.873.672.918	97,42%	91	91	100%
4725 Total				406.494.356.000	401.726.260.153	98,83%	116	116	100%
4726	FAB	Sistem Aplikasi Internal	Modul Aplikasi	400.000.000	-	0,00%	1	1	100%
FAB Total				400.000.000	-	0,00%	1	1	100%
4726 Total				400.000.000	-	0,00%	1	1	100%
4727	FAB	Sistem Aplikasi Internal	Modul Aplikasi	2.641.737.000	2.403.589.805	90,99%	1	1	100%
FAB Total				2.641.737.000	2.403.589.805	90,99%	1	1	100%
4727 Total				2.641.737.000	2.403.589.805	90,99%	1	1	100%
4836	CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	300.000.000	274.775.000	91,59%	36	36	100%
CAN Total				300.000.000	274.775.000	91,59%	36	36	100%
	EBA	Dukungan Pimpinan dan Keptokoleran	Layanan	4.290.800.000	3.086.071.576	71,92%	1	1	100%
		Layanan Perkantoran	Layanan	31.415.539.000	22.606.439.338	71,96%	1	1	100%
EBA Total				35.706.339.000	25.692.510.914	71,96%	2	2	100%
	EBB	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	69.500.000.000	897.435.000	1,29%	40	40	100%

EBB Total				69.500.000.000	897.435.000	1,29%	40	40	100%
	EBD	Laporan Keuangan Unit	Laporan	330.536.000	291.219.000	88,11%	2	2	100%
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	375.547.000	12.487.500	3,33%	1	1	100%
		Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	20.249.000	15.172.108	74,93%	1	1	100%
EBD Total				726.332.000	318.878.608	43,90%	4	4	100%
4836 Total				106.232.671.000	27.183.599.522	25,59%	82	82	100%
4837	EBA	Layanan Perkantoran	Layanan	69.254.890.000	59.958.283.316	86,58%	1	1	100%
		Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	Rekomendasi	4.820.408.000	2.089.061.217	43,34%	1	1	100%
EBA Total				74.075.298.000	62.047.344.533	83,76%	2	2	100%
	EBC	Pengembangan SDM	orang	3.100.000.000	2.477.889.587	79,93%	115	115	100%
EBC Total				3.100.000.000	2.477.889.587	79,93%	115	115	100%
4837 Total				77.175.298.000	64.525.234.120	83,61%	117	117	100%
4838	EBD	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Laporan	2.731.900.000	1.940.466.841	71,03%	15	15	100%
EBD Total				2.731.900.000	1.940.466.841	71,03%	15	15	100%
4838 Total				2.731.900.000	1.940.466.841	71,03%	15	15	100%
4839	FAB	Sistem Aplikasi Internal	Modul Aplikasi	5.144.431.000	1.190.120.612	23,13%	2	2	100%
FAB Total				5.144.431.000	1.190.120.612	23,13%	2	2	100%
4839 Total				5.144.431.000	1.190.120.612	23,13%	2	2	100%
6886	BMB	Pembinaan/Edukasi Publik	kegiatan	2.718.039.000	1.671.013.715	61,48%	9	9	100%
BMB Total				2.718.039.000	1.671.013.715	61,48%	9	9	100%
6886 Total				2.718.039.000	1.671.013.715	61,48%	9	9	100%
6990	ABA	Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua	Rekomendasi Kebijakan	2.311.680.000	142.489.766	6,16%	4	4	100%
ABA Total				2.311.680.000	142.489.766	6,16%	4	4	100%
	EBA	Dukungan Pimpinan dan Keptokoleran	Layanan	4.107.092.000	1.608.318.046	39,16%	12	12	100%
		Layanan Perkantoran	Layanan	7.075.456.000	6.819.422.545	96,38%	12	12	100%
				11.182.548.000	8.427.740.591	75,37%	24	24	100%
6990 Total				13.494.228.000	8.570.230.357	63,51%	28	28	100%
WA Total				33.855.319.704.000	28.998.648.311.287	85,65%	11.751.219	11.774.877	100%
Grand Total				33.934.661.757.000	29.066.796.815.445	85,66%	5.512.310.492	5.513.122.388	100,01%

### F.3 Pencapaian Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan III dengan rincian sebagai berikut.

1. PN I: Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 4 (empat) program/kegiatan prioritas yang tersebar pada 3 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp30.065.516.430.000,00 dan total realisasi sebesar Rp Rp30.044.162.214.114,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir (439039)	Rp8.420.708.000	Rp 5.525.046.998	65,61	Orang	5.000	18.000	360
2	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana	Rp 665.989.312.000	Rp 655.753.266.689	98,46	Milyar	100	686	686

	Program Lingkungan Hidup (439039)							
3	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (409999)	Rp 29.391.038.588.000	Rp 29.382.827.271.376	99,97	Rupiah	11.300.000	13.024.073	115,26
4	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker K/L (527010)	Rp 67.822.000	Rp56.629.051	83,50	Dokumen	5.000	5.000	100
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 30.065.516.430.000</b>	<b>Rp 30.044.162.214.114</b>	<b>99,93</b>				

## 2. PN III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) program/kegiatan prioritas yang tersebar pada 2 (dua) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp24.642.897.000,00 dan total realisasi sebesar Rp24.519.310.80100 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Pendanaan untuk Usaha mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Umi (440781)	Rp23.219.898.000	Rp 23.117.903.283	99,56	Usaha Mikro	2.200.000	2.208.840	100,40
2	Perluasan Cakupan Penyaluran Melalui Implementasi Skema Baru Pembiayaan Umi (527010)	Rp 1.422.999.000	Rp 1.401.407.518	98,48	Laporan	5	5	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 24.642.897.000</b>	<b>Rp 24.519.310.801</b>	<b>99,49</b>				

### F.4 Pencapaian Program Prioritas Utama

Pelaksanaan Program Prioritas Utama Untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 3 (tiga) program dengan total pagu sebesar Rp887.002.000,00 dan total realisasi sebesar Rp255.352.535,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Treasury Billing System (TBS) dalam rangka Penerimaan Negara secara Elektronik (Direktorat PKN)	Rp179.164.000	Rp14.910.000	8,32	Pemda	50	50	100
2	Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (Direktorat SP)	Rp622.111.000	Rp167.961.000	27	Sistem Informasi	1	30	200
3	SIT dan UAT Ulang Sistem Pembayaran Collecting Agent (Direktorat PKN)	Rp85.727.000	Rp72.481.535	84,55	Layanan	75	75	100
<b>Jumlah</b>		<b>Rp887.002.000</b>	<b>Rp255.352.535</b>	<b>28,79</b>				

### F.5 Pengungkapan Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun

Terdapat 18 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan pekerjaan belum selesai sampai dengan akhir tahun 2024 dengan total nilai sebesar Rp50.488.840.795 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Saldo RPATA
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	46.713.500
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	454.293.154
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	26.233.158.197
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	1.231.581.495
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	348.950.000
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	1.641.650.063
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	65.443.020
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.273.111.860
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	543.068.014
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	1.398.558.461
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	44.470.426
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	238.725.000
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	343.489.419
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	81.278.529
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.113.923.953
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	6.673.595.877
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	151.668.208
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	7.605.161.619
<b>Total</b>	<b>50.488.840.795</b>

## F.6 BMN BERSENGKETA DI LINGKUNGAN DITJEN PERBENDAHARAAN

BMN bersengketa di pengadilan merupakan BMN yang didaftarkan bersengketa di pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN maupun Mahkamah Agung. Terdapat 8 (delapan) NUP/barang yang bersengketa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas BMN	Nilai Perolehan	Status
1	Kanwil DJPb provinsi Jawa Timur	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	25	322	3.079.728.000	Kemenkeu Menang, Belum dilakukan eksekusi
2	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	16	315	3.012.778.000	Menunggu putusan Tingkat kasassi
3	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	21	50	217.789.000	Menunggu putusan Tingkat kasassi
4	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara	24	303	2.898.005.000	Derden Verzet

	TIMUR		Golongan II				
5	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	24	50	94.383.000	Derden Verzet
6	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	26	328	3.137.115.000	Banding di Pengadilan Tinggi
7	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	1	8.880	48.169.475.000	Banding di Pengadilan Tinggi
8	KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI UTARA	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	11	620	3.883.684.000	Kemenkeu Kalah, Masih dilakukan upaya hukum lain untuk membatalkan hasil putusan tersebut

## F.7 TERDAPAT ASET TETAP TANAH DAN BANGUNAN PADA DJPB YANG BERSENGKETA DAN DIKUASAI PIHAK LAIN

### 1. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara

Terdapat Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 yang ditatausahakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 143 seluas 6.831 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Bethesda no 8, Manado dengan nilai buku sebesar Rp65.838.606.000,00 yang saat ini digunakan sebagai lokasi Gedung keuangan Negara (GKN) Manado berpotensi hilang atau lepas dari penguasaan Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun beberapa penjelasan mengenai permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Hal tersebut disebabkan karena BMN dimaksud digugat ke Pengadilan Negeri Manado oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut. Gugatan tersebut telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Nomor 15 PK/PDT/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang memutuskan Kementerian Keuangan untuk membayar ganti rugi atas aset dimaksud sebesar Rp512.325.000,- (lima ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pihak Penggugat.
- b. Mahkamah Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) menolak permohonan PK (Kemenkeu kalah). Putusan PTUN membatalkan SHP No. 143 a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan. Pembatalan SHP dilakukan setelah penghapusan aset dari Pengguna Barang melalui persetujuan Pengelola Barang. Atas hal tersebut, DJPb akan melakukan klarifikasi kepada BPN atas terbitnya sertifikat ganda dan mempertimbangkan akan melakukan gugatan perdata atas perbuatan

melawan hukum. Kemudian pada tahun 2023, Kantor Hukum Victor Rumambi S.H & Sociates Advokat & Konsultan Hukum mengirim surat Pengosongan dan Penyerahan Tanah Bangunan kepada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Nomor 014/Som-VR/02/2023. Atas hal tersebut dilakukan rapat pembahasan Sengketa BMN sesuai dengan Undang-undang Nomor UND-45/SJ.7/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2024 dengan dihadiri oleh para perwakilan Biro Advokasi, Inspektorat VI, Sekretariat DJPb dan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara. Pihak Kementerian Keuangan saat ini masih berupaya melakukan proses perlawanan hukum guna membatalkan putusan inkrah tersebut, dan saat ini Biro Advokasi sedang menunggu informasi dari Pengadilan/Kejaksaan di Manado dalam rangka mencari bukti baru.

- c. Kanwil DJPb memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dikarenakan memiliki Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 143 dibandingkan dengan penggugat yang hanya memiliki erpacht verponding sehingga DJPb akan terus berusaha untuk mempertahankan kepemilikan dan tidak akan membayar ganti rugi sebesar nilai keputusan pengadilan. Kantor Pusat DJPb akan terus berkoordinasi dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dan Biro Advokasi terkait penyelesaian dengan mengajukan Peninjauan Kembali Kedua (PK Kedua) ke Mahkamah Agung serta upaya hukum oleh Pengelola Barang (DJKN).
- d. Berkaitan dengan penanganan Perkara di atas (Perdata Nomor 137/Pdt.G/2004/PN.Mdo) di Pengadilan Negeri Manado, disampaikan informasi tambahan sebagai berikut :
  - 1) Perkara Perdata tersebut diajukan oleh Frans Tumuyu, Leonardi Tonggwasito, dan Hengky Kaunang terhadap Kementerian Keuangan, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Kantor Pertanahan Manado terkait dengan penguasaan Tanah SHP Nomor 143 tanggal 21 September 1983 seluas 6.831 m<sup>2</sup> yang sekarang berdiri di atasnya Gedung Keuangan Negara Manado.
  - 2) Dalam perkara perdata dimaksud, Penggugat telah mengajukan bukti Surat Silsilah Perkawinan antara Alm. Lie Boen Yat dengan Alm. Sie Djok Nio, dan Alm. Lie Goan Tek dengan Alm. Marie Kaunang, yang ternyata surat tersebut diketahui palsu sebagaimana tercantum dalam Perkara Pidana Nomor 1210K/Pid/2012 jo. No. 45/PID/2012/PT.MDO jo. No 480/PID.B/2011/PN.MDO dengan Terdakwa/Terpidana Hengky Kaunang yang merupakan salah satu pihak Penggugat dalam perdata Nomor 137/Pdt.G/2004/PN.Mdo tersebut.
  - 3) Berkenaan dengan hal itu, Biro Advokasi sudah meminta asli Salinan putusan Perkara Pidana Nomor 1210K/Pid/2012 jo. No.

45/PID/2012/PT.MDO jo. No 480/PID.B/2011/PN.MDO dengan Terdakwa/Terpidana Hengky Kaunang, beserta dokumen-dokumen/berkas perkara pidana pada Pengadilan namun belum diperoleh dokumennya. Timeline untuk pelaksanaan Koordinasi Aset antara KPB, Eselon I, Pengguna Barang dan Biro Advokasi terkait pencarian novum baru akan dilaksanakan pada Semester 2 2025.

## **2. Tanah Rumah Negara Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara (Tikala)**

Terdapat Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 11 yang ditatausahakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 81/Tikala seluas 620 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. TNI No.41, Tikala, Manado dengan nilai buku sebesar Rp3.883.684.000,00 yang saat ini digunakan sebagai Rumah Dinas KPPN Manado berpotensi hilang atau lepas dari penguasaan Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun beberapa penjelasan mengenai permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Hal tersebut disebabkan karena BMN dimaksud digugat ke Pengadilan Negeri Manado oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut. Gugatan tersebut telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Nomor Nomor 95/PK/TUN/2018 j.o. Putusan PTUN Manado Nomor 41/G/2016PTUN.Mdo yang menyatakan pembatalan hak atas tanah atau sertipikat tanah dilakukan setelah penghapusan aset dari pengguna dan/atau persetujuan pengelola aset.
- b. Atas putusan tersebut, DJPb akan berkoordinasi dengan Biro Manajemen Aset dan Pengadaan selaku pengguna barang untuk merumuskan solusi atas permasalahan dimaksud serta dengan Biro Advokasi terkait upaya hukum yang akan ditempuh selanjutnya.
- c. Permasalahan tersebut berawal dari Surat Kepala BPN kepada Kepala Kanwil DJKN Sultenggomalut nomor MP.01.01/393-71.71/VII.2021 tanggal 6 Juli 2021 hal Penyampaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. DJKN membalas surat tersebut untuk berkoordinasi dengan DJPb. Kepala BPN mengirimkan surat kembali kepada Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara nomor MP.01.01/455 - 71.71/VIII/2021 hal Penyampaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Gugatan tersebut merupakan gugatan kepada BPN untuk membatalkan penerbitan SHP No. 81 dan tidak melibatkan Kemenkeu c.q DJPb secara langsung. Tanah tersebut telah dikuasai oleh DJPb sejak tahun 1974 sesuai dengan SHP No. 81 tanggal 31 Mei 1974.

- d. Setelah adanya pemberitahuan tersebut, DJPb telah melakukan rapat koordinasi dengan Sekretariat DJPb, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Kanwil DJKN Sultenggomalut, dan Biro Advokasi pada 29 Maret 2021 untuk merumuskan solusi terkait permasalahan aset tersebut. Hasil rapat tersebut yaitu di antaranya:
  - 1) Kanwil DJKN Sultenggomalut dan Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara akan berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian ATR/BPN;
  - 2) Kementerian keuangan dapat membawa kasus ini ke ranah pidana dengan alasan penerbitan sertipikat ganda.
- e. Selanjutnya Sekretariat DJPb akan berkoordinasi dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dan Biro Advokasi terkait tindak lanjut hasil rapat pada tahun 2021 tersebut dan akan melakukan upaya hukum lanjutan (Kasasi, Peninjauan Kembali, Dsb). Timeline untuk pelaksanaan Koordinasi Aset antara KPB, Eselon I, Pengguna Barang dan Biro Advokasi serta BPN Kota Manado terkait perkara dimana Kemenkeu bukan Sebagai pihak tergugat namun sertifikat tanah Kemenkeu turut dibatalkan akan dilaksanakan pada Semester 2 2025.

### **3. Tanah Kantor Pusat DJPb Cempaka Baru**

Terdapat Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan NUP 3 seluas 60.000 m<sup>2</sup> yang belum memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang beralamat di Jl. Cempaka Baru IV, V, VI, VII, VIII, IX Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan nilai buku sebesar Rp341.182.884.000,00 dan Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan NUP 4 seluas 8.036 m<sup>2</sup> beralamat di Jl. Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan nilai buku sebesar Rp68.802.775.000,00 yang ditatausahakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun beberapa penjelasan mengenai permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Pada bidang tanah 20.340 m<sup>2</sup> telah terdapat bangunan berupa Gedung arsip dan rumah Negara. Namun, baru bersertifikat Hak Pakai sesuai ketentuan seluas 6.605 m<sup>2</sup>. Sedangkan pada bidang tanah 60.000 m<sup>2</sup> tidak terdapat bangunan milik DJPb dan belum memiliki SHP sesuai ketentuan. Sejak peralihan hak pada tahun 1965 hingga saat ini, DJPb (Dahulu DJA) belum pernah dan tidak merasa memberikan/mengeluarkan persetujuan izin kepada pihak manapun untuk melakukan penggunaan/pemanfaatan terhadap bidang tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> dan 20.340 m<sup>2</sup> tersebut.
- b. Terkait dengan permasalahan di atas, DJPb telah melakukan upaya pemblokiran tanah pada kedua bidang tanah tersebut sesuai dengan surat nomor S-6273/PB.1/2010 Tanggal 18 Agustus 2010 hal Penegasan Kepemilikan Tanah Milik Negara atas nama Direktorat Jenderal Anggaran/

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan S-1/PB.1/PB.14/2023 Tanggal 12 Januari 2023 hal Informasi dan Konfirmasi Terkait BMN Berupa Tanah Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan di Cempaka Baru.

- c. Selanjutnya, kantor Pusat DJPb akan menyusun matriks penyelesaian yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Mengumpulkan Dokumen terkait klaim kepemilikan DJPb terhadap tanah di Cempaka Baru;
  - 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat (BPN) untuk memverifikasi batas-batas tanah di lapangan;
  - 3) Melakukan koordinasi lanjutan dengan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (BPN), Kecamatan dan Kelurahan;
  - 4) Mencoba untuk melakukan pengukuran kembali bidang tanah dengan melibatkan Konsultan dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi sebagai Mitra Resmi Kantor Pertanahan.
- d. Langkah-langkah pada matriks tersebut, dilakukan di tahun 2025 dan 2026, selanjutnya akan dikoordinasikan dan disampaikan kepada Biro Manajemen BMN dan pengadaan sebagai temuan pada Pengguna Barang Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- e. Timeline untuk pelaksanaan Koordinasi Aset antara KPB, Eselon I, Pengguna Barang dan Biro Advokasi serta rencana pengukuran tanah dengan menggunakan Surveyor Berlisensi untuk meminimalisir adanya benturan/bentrok/hal-hal yang tidak diinginkan antara pemerintah dengan warga akan dilaksanakan pada Semester 2 2025.

#### **4. Tanah Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat**

Terdapat tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 2 yang ditatausahakan oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 27.400 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Diponegoro No.59, Cibeunying Kaler, Kota Bandung dengan nilai buku sebesar Rp502.942.222.000,00 yang saat ini digunakan sebagai Gedung Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat yang sebagian dari luas tanah tersebut diklaim sebagai milik Pemerintah Kota Bandung. Adapun beberapa penjelasan mengenai permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Atas BMN tanah tersebut, pihak DJPb telah mengajukan permohonan sertifikasi dan telah ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan melaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah. Namun, berdasarkan Rapat Klarifikasi antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung pada tanggal 2 Agustus 2021 Pemkot Bandung menyatakan klaim atas sebagian kepemilikan tanah di area yang sama. BPN

kemudian menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada Pemkot Bandung terkait dasar klaim, dan Pemkot Bandung merespon BPN dengan hanya melampirkan bukti kepemilikan berupa Peta Aset BKAD Kota Bandung. Kemudian ditindaklanjuti dengan rakor yang memperoleh kesimpulan bahwa, BPN menyarankan mediasi dengan Pemkot Bandung, karena penerbitan sertifikat instansi pemerintah tidak dapat dilakukan selama ada klaim dari instansi lain.

- b. Pada tanggal 6 April 2022, dilakukan Rapat Audiensi Pensertifikatan tanah bersama Plt. Walikota Bandung di balai kota Bandung. Pihak Pemkot Bandung melalui Kepala BPAKD Kota Bandung menyampaikan penjelasan atas klaim terhadap sebagian tanah di area Gedung Dwi Warna tersebut berupa peta dan informasi pembelian tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang dilakukan pada tahun 1934. Selain itu, Plt. Walikota Bandung menyampaikan bahwa salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan tukar menukar aset antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung meminta diberikan aset lain milik Kementerian Keuangan. Perwakilan dari Kanwil DJKN Jawa Barat yang hadir pada agenda tersebut meminta klarifikasi atas pembelian tanah tersebut pada tahun 1934 dimana saat itu Indonesia belum merdeka, dan menyarankan perlunya dilakukan Reviu oleh APIP (Inspektorat Kota Bandung) atas penatausahaan aset yang oleh Pemkot Bandung untuk memastikan kebenaran penatausahaan/pencatatan aset tersebut, namun usulan tersebut ditolak oleh Kepala BPKAD Kota Bandung.
- c. Atas hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat menyurati Kepala Kanwil DJKN Provinsi Jawa Barat yang pada intinya menanyakan ketersediaan aset pengganti untuk hibah dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sesuai alternatif solusi yang ditawarkan oleh Plt. Walikota Bandung. Atas surat tersebut, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa belum terdapat BMN yang di wilayah Kota Bandung yang dapat digunakan sebagai lahan perkantoran untuk objek pertukaran aset. Selain itu Kanwil DJKN Provinsi Jawa Barat menyarankan perlunya dijajaki opsi lain dalam rangka penyelesaian sertifikasi tanah pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di Jalan Diponegoro No. 59, Bandung.
- d. Terkait Pengamanan BMN pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, kami sampaikan bahwa Kuasa Pengguna Barang telah melakukan pengamanan BMN berupa tanah sebagaimana KMK 334/KM.01/2021 tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan yaitu:
  - 1) Pengamanan Fisik dengan memasang pagar atas tanah dimaksud;

- 2) Pengamanan Administrasi dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
- 3) Pengamanan Hukum terhadap tanah seluas 27.400m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Diponegoro 59/Jalan Surapati No. 50, yaitu berupa permohonan sertifikasi tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Nomor S-238/WPB.13/2021 tanggal 3 Februari 2021 hal Permohonan Sertifikasi Aset Tanah Jl. Diponegoro 59/Jalan Surapati No. 50, Bandung;
- 4) Meminta informasi Perkembangan Sertifikasi Aset Tanah Jl. Diponegoro 59/Jalan Surapati No. 50, Bandung kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung, mengingat telah dilakukan pengukuran dan penyetoran PNBP biaya pengukuran tanah ke rekening kas negara, serta pembahasan klarifikasi batas bidang tanah sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung nomor 1323/32.73.100/IP.01.01/VIII/2021 tanggal 29 Juli 2021, namun hasil pengukuran dan informasi perkembangan sertifikasi tidak diperoleh;
- 5) Objek bidang tanah tersebut dimasukkan oleh Pengguna Barang dalam target pensertifikatan tanah pada tahun 2025 sebagaimana nota dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan nomor ND-223/SJ.7/2025 tanggal 5 Maret 2025 hal Penyampaian Target Program Percepatan Pensertifikatan BMN Berupa Tanah TA 2025 Pada Kementerian Keuangan;
- 6) Melaksanakan upaya penertiban sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara diantaranya yaitu, dengan melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang mengklaim BMN bersangkutan (Pemerintah Daerah Kota Bandung), baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah terkait (Kanwil DJKN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kota Bandung);
- 7) Mencari opsi lain terkait penyelesaian sertifikasi tanah dimaksud antara lain dengan Pensertifikasian sebagian lahan di luar yang diklaim Pemkot Bandung dengan meminta kepada Pemkot Bandung untuk memberikan salinan peta tanah yang diklaim melalui Surat Nomor S-3625/WPB.13/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Berkaitan dengan permintaan peta bidang tanah dalam rangka pelaksanaan sertifikasi sebagian lahan yang tidak beririsan dengan luasan yang diklaim Pemkot Bandung tersebut, pada tanggal 27 September 2023 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat diundang oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung

melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor IP.02.01/1999-32.73.100/IX/2023 tanggal 20 September 2023 hal Permintaan Salinan Peta Tanah dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Bandung pada Jl. Diponegoro No. 59, Bandung Namun, Pemkot Bandung menolak untuk memberikan salinan Peta Tanah dimaksud;

- 8) Kantor Pusat DJPb akan melakukan koordinasi dengan Biro Manajemen BMN, Pengadaan serta Biro Advokasi serta Kanwil DJKN Prov Jawa Barat terkait opsi penyelesaian permasalahan aset tersebut;

## **5. Tanah Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung**

Terdapat Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 2 yang ditatausahakan oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.11/T.G. seluas 310 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Sonokeling No.4, Tanjunggading, Kedamaian, Kota Bandar Lampung dengan nilai buku sebesar Rp970.204.000,00 yang saat ini digunakan sebagai Rumah Negara Golongan II Tipe D, diklaim sebagai milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) DIVRE IV Tanjungkarang.

Klaim tersebut berdasarkan surat Manager Penjagaan Aset dan Komersialisasi Non Angkutan a.n. Deputy Divisi Regional IV Tanjungkarang tanggal 17 Maret 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah dimaksud merupakan Aktiva Tetap milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan dokumen Grondkaart No.7 Tahun 1913 dan pihaknya bersedia untuk mediskusikan perihal tersebut dengan Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Adapun beberapa penjelasan mengenai permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Atas surat tersebut, sudah ditanggapi oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa tanah beserta bangunan rumah negara yang berada di Jalan Sonokeling Nomor 4, Kelurahan Tanjung Gading, Kota Bandar Lampung tersebut adalah barang milik negara (BMN) Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menjadi obyek penatausahaan BMN dan tercatat dalam Daftar Inventaris Aset Negara pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Barang. Tanah tersebut merupakan hasil perolehan/pelepasan hak dari pemilik sebelumnya pada tahun 1973 dan telah tercatat pada Plot Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung serta didukung Tanda Bukti Hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/T.G tahun 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Di atas tanah tersebut juga telah berdiri Rumah Negara Golongan II Tipe D sejak tahun 1979.

- b. Atas jawaban Kanwil DJPb Provinsi Lampung tersebut, belum ada respon lebih lanjut dari pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) DIVRE IV Tanjungkarang.
- c. Terkait Pengamanan BMN pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung, kami sampaikan bahwa Kuasa Pengguna Barang telah melakukan pengamanan BMN berupa tanah sebagaimana KMK 334/KM.01/2021 tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan yaitu:
  - 1) Pengamanan Fisik dengan memasang pagar atas tanah dimaksud dan memasang label sebagai rumah dinas Kementerian Keuangan;
  - 2) Pengamanan Administrasi dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
  - 3) Pengamanan Hukum dengan melaksanakan sertipikasi atas tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan yaitu Sertipikat Hak Pakai a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. K/L ( SHP a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Nomor 11/T.G). BMN dimaksud telah ditetapkan Status Penggunaannya oleh Pengelola Barang (KPKNL Bandar Lampung) dengan Surat Keputusan nomor 132/KM.6/WKN.05/KNL.03/2020 tanggal 10 November 2020.
  - 4) Selanjutnya Kanwil DJPb Prov. Lampung akan melakukan upaya pengamanan fisik dengan menambahkan plang tanah milik negara c.q.Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat DJPb akan berkoordinasi dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan serta Biro Advokasi terkait permasalahan tersebut meskipun sampai saat ini masih belum ada tanggapan lebih lanjut dari PT Kereta Api Indonesia (Persero).